

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
PERIODE TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Oleh :

ELSI WIRA ELFITA
1805906030004



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2022**

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
PERIODE TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

ELSI WIRA ELFITA
1805906030004



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2022**

Meulaboh, 14 November 2022

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi Saudara:

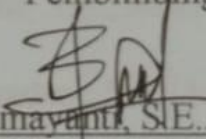
Nama : Elsi Wira Elfita

Nim : 1805906030004

Dengan Judul : **Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2017-2021**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

Mengesahkan:
Pembimbing



Fatmahanik, S.E., M.Si

NIP: 199005302019032015

Mengetahui:

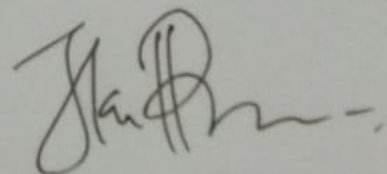
Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. T. Zulham, S.E., M.Si

NIP: 19600212198931003

Ketua Program Studi Akuntansi



Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak

NIP: 198805132022032003

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Elsi Wira Elfita

Nim : 1805906030004

Dengan Judul : **Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2017-2021**

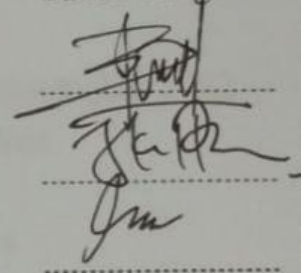
Yang telah dipertahankan didepan komisi ujian pada tanggal 14 November tahun 2022

Menyetujui

Komisi Ujian

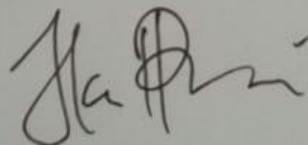
1. Ketua : Fatmayanti, S.E., M.Si
2. Sekretaris : Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak
3. Anggota : Ikhsan, S.E., M.Ak

Tanda Tangan



Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi



Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak
NIP: 198805132022032003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsi Wira Elfita

NIM : 1805906030004

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 14 November 2022
Yang Menyatakan

Elsi Wira Elfita
NIM: 1805906030004

PERSEMBAHAN

Katakanlah (Muhammad), "Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)." (QS Al-kahf ayat 109)

Alhamdulillah

Dengan ridha-Mu Ya Allah

Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah, Namun itu bukan akhir dari perjalananku, Melainkan awal dari sebuah perjalanan

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Khalidon dan Ibunda Lisnawati. Do'a dan air mata di tiap sujudmu yang selalu iringi langkahku serta ketulusan mu Yang menguatkan hatiku tuk terus berusaha menggapai mimpi.

Setiap butir keringatmu menyemangatkanku untuk mewujudkan harapanmu. Kasih sayangmu sejukkan relung hatiku. Terimakasih ayah ibu atas segala kesabaranmu, kebaikanmu dan segala hal terbaik yang telah kalian berikan kepada putrimu. Ayah ibu....Kalian telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tapi aku berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia, kini harapanmu telah kugapai dan berjanji akan selalu membahagiakanmu terimakasih ayah ibu.

Teruntuk kakak tercinta Destria Mustika dan adik tersayang Khalil Juniza yang luar biasa memberi do'a dan dukungan tanpa henti. Tiada masa yang berharga selain menghabiskan waktu bersama kalian, walaupun saat dekat sering bertengkar tetapi saat jauh kita saling merindukan.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada nenek dan Saudara- Saudara yang selalu mengingatkan saya untuk selalu membanggakan keluarga, serta mendukung baik dari segi motivasi maupun harta benda.

Teruntuk Sahabat tercinta Sapna Julita Roza, Zahra Fonna dan Puja Julia Desfita terimakasih selalu ada disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki kalian dalam hidup saya. Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat saya membutuhkannya. Semoga persahabatan kita abadi sebagaimana ukiran yg di abadikan dalam karya ini.

Elsi Wira Elfita

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan ini skripsi yang berjudul “Analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten aceh barat”. Shalawat serta salam penulis sanjung sajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Teuku Umar Meulaboh. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rasa hormat penulis sampaikan terima kasih kepada :

- 1) Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si, Selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
- 2) Bapak Prof. Dr. Zulham, S.E., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
- 3) Ibu Ika Rahmadani, S.E., M.Si.Ak., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar sekaligus dosen penguji skripsi saya
- 4) Ibu Sari Maulida Vonna S.E., M.Si.Ak Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ekonomi Akuntansi Universitas Teuku Umar.

- 5) Ibu Fatmayanti, SE., Msi selaku Dosen Pembimbing yang sangat sabar dan telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan tugas akhir ini.
 - 6) Bapak Ikhsan, S.E., M.Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu, arahan, dan masukan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
 - 7) Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar yang telah memberikan ilmu, pengajaran, pengalaman, dan motivasi.
 - 8) Kedua orang tua, keluarga besar, yang memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan sepenuh hati, serta sangat berjasa dalam segala hal kepada penulis.
 - 9) Seluruh teman-teman, para sahabatku, yang telah memberikan semangat, banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
- Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua urusan dan skripsi ini dilancarkan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yang terkhusus bagi penulis dan para pembaca lainnya.

Meulaboh, 14 November 2022

ELSI WIRA ELFITA
NIM: 1805906030004

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsi Wira Elfita
NIM : 1805906030004
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalt Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh 14 November 2022
Yang Menyatakan

Elsi Wira Elfita
NIM: 180906030004

ABSTRAK

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT PERIODE TAHUN 2017-2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan meliputi: analisis varians pendapatan, analisis varians belanja, analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis pertumbuhan belanja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Analisis Varians Pendapatan menghasilkan rata-rata sebesar 9,88% yang artinya kinerja keuangan pendapatan dikatakan belum baik, 2) Analisis Varians Belanja menghasilkan rata-rata sebesar 91,09% yang artinya kinerja keuangan belanja pemerintah daerah dikatakan sudah baik, 3) Analisis Pertumbuhan Pendapatan menghasilkan pertumbuhan positif dengan rata-rata yaitu 8,42%, 4) Analisis Pertumbuhan Belanja menghasilkan pertumbuhan positif dengan rata-rata yaitu 57,22%.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE REALIZATION REPORT OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURES BUDGET IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF WEST ACEH DISTRICT FOR THE 2017-2021 PERIOD

This study aims to determine the use of the regional revenue and expenditure budget in the West Aceh District Government from 2017 to 2021. The analytical method used is qualitative method. The data used is secondary data with data collection techniques in the form of documentation. The analysis techniques used include: income variance analysis, expenditure variance analysis, income growth analysis and expenditure growth analysis.

The results of the study show that 1) Income Variance Analysis Produces an average of 9.88%, which means that the Income Financial Performance is said to be not good. 2) Expenditure Variance Analysis Yields an average of 91.09%, which means that the financial performance of local government spending is said to be good. 3) Analysis Of Income Growth produces positive growth with an average of 8.42%. 4) Analysis Of Spending Growth Produces positive growth with an average of 57.22%

Keywords: Reports On The Realization Of Regional Budget Revenues and Expenditures

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN | iv |
| PERNYATAAN ORSINALITAS | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | ix |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS..... | 10 |
| 2.1 Kajian Pustaka | 10 |
| 2.1.1 Konsep Anggaran..... | 10 |
| 2.1.2 Fungsi Anggaran | 12 |
| 2.1.3 Pendapatan | 14 |
| 2.1.4 Belanja Daerah | 15 |
| 2.1.5 Kinerja Keuangan Daerah..... | 17 |
| 2.1.6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 19 |
| 2.1.7 Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah..... | 22 |
| 2.1.8 Penelitian Terdahulu | 24 |
| 2.2 Kerangka Penelitian..... | 27 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| 3.1 Desain Penelitian | 28 |
| 3.2 Populasi dan Sampel..... | 29 |
| 3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 3.3.1 Jenis dan Sumber Data..... | 30 |
| 3.3.1 Teknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| 3.4 Operasional Variabel | 30 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 31 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 36 |
| 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian..... | 36 |
| 4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Barat | 36 |
| 4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat..... | 37 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2 Hasil Penelitian..... | 38 |
| 4.2.1 Deskripsi Data | 38 |
| 4.3 Analisis Data | 41 |
| 4.3.1 Analisis Varians Pendapatan | 41 |
| 4.3.2 Analisis Varians Belanja | 43 |
| 4.3.3 Analisis Pertumbuhan Pendapatan | 45 |
| 4.3.4 Analisis Pertumbuhan Belanja | 47 |
| 4.4 Pembahasan | 49 |
| BAB V PENUTUP | 57 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 57 |
| 5.2 Saran | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.3 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat | 3 |
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu | 24 |
| Tabel 3.1 | Kriteria Penilaian Kinerja Varians Pendapatan..... | 32 |
| Tabel 3.2 | Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja..... | 33 |
| Tabel 3.3 | Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Pendapatan..... | 34 |
| Tabel 3.4 | Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja | 35 |
| Tabel 4.1 | Batas-Batas Wilayah Kabupaten Aceh Barat..... | 38 |
| Tabel 4.2 | Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021 | 38 |
| Tabel 4.3 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021 | 39 |
| Tabel 4.4 | Perhitungan Varians Pendapatan Pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021 | 41 |
| Tabel 4.5 | Perhitungan Varians Belanja Pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021 | 43 |
| Tabel 4.6 | Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021 | 45 |
| Tabel 4.7 | Perhitungan Pertumbuhan Belanja Pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021 | 47 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Skema Pemikiran..... | 27 |
|---------------------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Data Penelitian Tahun 2016..... | 63 |
| Lampiran 2 Data Penelitian Tahun 2018..... | 65 |
| Lampiran 3 Data Penelitian Tahun 2019..... | 67 |
| Lampiran 4 Data Penelitian Tahun 2020..... | 69 |
| Lampiran 5 Data Penelitian Tahun 2021..... | 71 |
| Lampiran 6 Analisis Varians Pendapatan..... | 73 |
| Lampiran 7 Analisis Varians Belanja..... | 73 |
| Lampiran 8 Analisis Petumbuhan Pendapatan..... | 73 |
| Lampiran 9 Analisis Pertumbuhan Belanja..... | 74 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012). Otonomi daerah dilaksanakan dengan maksud agar daerah dapat menangani urusan pemerintahan didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah memberikan kuasa penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. APBD mempunyai suatu rencana pendapatan dan belanja tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD (Indriani Amanda, 2019).

Penganggaran merupakan bagian terpenting dari pengelolaan keuangan pemerintahan dan dapat dijelaskan dari berbagai perspektif, seperti politik, ekonomi, keuangan, dan akuntansi (Abdullah, 2012). Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Untuk menjalankan rencana atau mengembangkan kebesaran tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang

utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah (Adisasmita, 2011).

Laporan keuangan pemerintah daerah sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang memuat informasi tentang besaran anggaran setelah perubahan, realisasinya selama satu tahun anggaran, dan perbedaan diantara keduanya, yang disebut selisih atau *variances* pasal 31 UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 7 PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara baik. Dalam kinerja penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget* yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sebelumnya merupakan kegiatan yang harus diteruskan pada tahun berikutnya (Halim, 2016:142).

Oleh karena itu usaha pemerintah daerah dalam mencapai tujuan sasaran menggunakan anggaran sebagai alat untuk mengukur perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang hendak dicapai dalam satu periode (Bastian, 2018).

Penggunaan analisis kinerja keuangan sebagai alat keuangan sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada

lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis dalam kinerja sebagai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Menilai kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021

| Tahun | Uraian | Anggaran(Rp) | Realisasi(Rp) | % |
|-------|------------|----------------------|----------------------|-------|
| 2017 | Pendapatan | 1.422.813.210.350,69 | 1.364.768.498.288,08 | 95,92 |
| | Belanja | 1.464.801.068.660,89 | 1.353.258.094.692,40 | 92,38 |
| 2018 | Pendapatan | 1.272.036.731.259,90 | 1.250.681.695.136,38 | 98,32 |
| | Belanja | 1.039.708.958.846,78 | 931.754.345.242,00 | 89,61 |
| 2019 | Pendapatan | 1.425.410.708.131,00 | 1.399.139.190.532,32 | 98,15 |
| | Belanja | 1.193.075.439.237,26 | 1.052.106.351.389,69 | 88,18 |
| 2020 | Pendapatan | 1.319.983.684.574,00 | 1.327.545.973.658,59 | 100,5 |
| | Belanja | 1.104.772.167.316,89 | 993.468.521.285,57 | 89,92 |
| 2021 | Pendapatan | 1.321.062.239.778,00 | 1.340.506.333.454,01 | 101,4 |
| | Belanja | 1.421.161.267.425,91 | 1.338.446.864.092,44 | 94,18 |

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat

Dari tabel diatas, hasil laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 laporan realisasinya mengalami *fluktuasi* dari tahun ke tahun. *Fluktuasi* yaitu ketidaketapan kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan pada pendapatan dan belanja daerah di tiap tahunnya. Bisa saja anggaran lebih besar dari realisasi dikarenakan adanya faktor luar seperti kenaikan harga (*inflasi*) mendadak sehingga mempengaruhi penggunaan belanja dari anggaran atau ketidakekonomis yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak tepat. Sebaliknya dilihat dari alokasi penggunaan anggaran lebih besar dari apa yang terealisasi hal ini berarti Badan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Aceh Barat tidak menggunakan penyerapan anggaran sesuai rencana atau kinerja dengan tidak ekonomis.

Berdasarkan berita dari *Melaboh, Acehportal.com* tanggal 16 Agustus 2020 (<https://aceh.bpk.go.id/kalitas-proyek-tahun-anggaran-2019-di-aceh-barat-dinilai-buruk/>). Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat juga melihat adanya pelaksanaan proyek dari APBK Aceh Barat tahun anggaran 2019 tidak terealisasi secara baik. Artinya, kualitas pelaksanaan kegiatan di sana masih buruk. Meski APBK Aceh Barat tahun 2019 telah terealisasi sebesar 98,16 persen atau Rp 1.399 triliun dari target Rp 1.425 triliun, namun pada pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah masalah.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra mengatakan, berdasarkan pencatatan pihaknya paska monitoring lapangan terhadap sejumlah proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari APBK murni maupun Otonomi Khusus (Otsus), beberapa kegiatan diantaranya diduga tidak berkualitas. Jika dilihat dari realisasi ABPK 2019 dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa kegiatan yang menguras APBK maupun Otsus sekitar Rp 30,8 miliar diduga meninggalkan masalah. Anggaran itu terbagi ke beberapa kegiatan seperti konstruksi, fisik jalan, gedung, pengadaan bibit dan pembangunan mess guru.

PP No. 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Pasal 2 ayat (2) kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk

melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.

Sebagai komponen utama dari penerimaan daerah, besaran pendapatan akan sangat menentukan besaran alokasi belanja. Pengaruh pendapatan terhadap belanja ini memang masih menjadi perdebatan karena jenis pendapatan sendiri tidak secara otomatis dialokasikan untuk mendanai belanja-belanja tertentu. Pemerintah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu dianggap baik. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal ini butuh tindakan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target, apakah hal tersebut dipengaruhi oleh tehnik penyusunan anggaran atau ada faktor penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara realisasi pendapatan dengan jumlah yang dianggarkan, sehingga menyebabkan pendapatan kurang baik.

Pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, kemudian pendapatan daerah tersebut oleh daerah dipergunakan untuk membiayai belanja daerah. Belanja Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintahan daerah dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Belanja daerah dapat pula didefinisikan sebagai semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yaitu anggaran belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Lontaan, 2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Evi Nila Sari yang berjudul *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Analisis Varians Pendapatan menghasilkan rata-rata sebesar 93,64% yang artinya kinerja keuangan pendapatan dikatakan belum baik, 2) Analisis Varians Belanja menghasilkan rata-rata sebesar 90,95% yang artinya kinerja keuangan belanja pemerintah daerah dikatakan sudah baik, 3) Analisis Pertumbuhan Pendapatan menghasilkan pertumbuhan positif dengan rata-rata

yaitu 3,78%, 4) Analisis Pertumbuhan Belanja menghasilkan pertumbuhan positif dengan rata-rata yaitu 4,49%.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti tentang penelitian ini yang berjudul "**Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat**"

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis varians pendapatan sudah baik?
2. Apakah penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis varians belanja sudah baik?
3. Apakah penggunaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan sudah positif?
4. Apakah penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis pertumbuhan belanja sudah positif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis varians pendapatan sudah baik
2. Untuk mengetahui penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis varians belanja sudah baik
3. Untuk mengetahui penggunaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan sudah positif
4. Untuk mengetahui penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari analisis pertumbuhan belanja sudah positif.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan atau referensi serta sebagai sumber informasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan peningkatan kapasitas penulis dalam bidang akuntansi sektor publik dalam rangka penyelesaian studi akhir, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.
- b. Bagi pemerintah daerah, diharapkan sebagai tambahan bahan referensi dan bahan masukan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternatif untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan uang yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (Periode) tertentu dimasa yang akan datang. Setelah anggaran yang menjadi pedoman dalam mengerjakan kegiatan yang telah direncanakan, realisasi anggaran harus juga diperhatikan. Sedangkan Nafarin (2013), mendefinisikan bahwa Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Sasongko dan Parulian (2015), berpendapat bahwa Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif.

Budidarma (2010:20) menjelaskan anggaran berasal dari kata *budget* (Inggris), sebelumnya dari kata *bougette* (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumberdaya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang

diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/ belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Nafarin (2019:12) Anggaran sebagai suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk financial, sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2019:61). Sedangkan menurut Halim (2017:164) Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu satu tahun.

Menurut Halim dan Kusufi (2016:48) anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Halim (2017:93) mengemukakan beberapa alasan mengapa anggaran dianggap penting. Pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat.

2.1.2 Fungsi Anggaran

Perencanaan dan pengendalian dalam suatu instansi pemerintah sangat diperlukan untuk tujuan yang ingin dicapai. Anggaran pemerintah dapat tumbuh dan berkembang, maka perlu diterapkan suatu anggaran dalam pemerintahan. Dengan adanya anggaran, pemerintah dapat melaksanakan kegiatan dan mengetahui kemungkinan penyimpangan yang terjadi dari rencana kegiatan. Suatu anggaran disusun untuk mencoba menjawab dan memperkirakan apa-apa saja yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Hal ini merupakan bagian dari fungsi perencanaan, karena merupakan proyeksi kedepan dan dijabarkan dalam bentuk angka-angka. Untuk itu sangat dibutuhkan persiapan penyusunan anggaran yang matang, jelas, dan teliti. Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengungkapkan metode yang lazim digunakan. Pilihan metode ini sangat tergantung pada kondisi dan kegiatan manajemen yang bersangkutan. Proses penyusunan anggaran adalah tahap kegiatan yang dilakukan dalam anggaran sehingga tersusun dan menjadi pegangan manajemen dalam kegiatan operasional.

Menurut Halim dan Kusufi (2017:48) terdapat beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik, yaitu:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan anggaran dengan fungsi perencanaan yaitu anggaran sebagai tujuan target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu. Dalam rangkai pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari

perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*missappropriation*), atau adanya penggunaan yang tidak semestinya (*misspending*).

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Setiap unit kerja pemerintahan terkait dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya pencapaian tujuan organisasi secara tidak konsisten.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Dalam hal ini, kinerja pemegang anggaran akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan hasil yang dicapai dikaitkan dengan

anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

g. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

2.1.3 Pendapatan

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivananya kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor (Hanum, 2011).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Dalam persyaratan standar akuntansi keuangan (PSAK) N. 23 (revisi 2009) pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan entitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal pendapatan adalah arus masuk aktiva dana atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produk barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama satu periode. Martani, dkk (2015) menyatakan bahwa Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk pada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), deviden (*dividend*), dan royalti (*royalty*).

2.1.3.2 Tujuan Penyusunan Pendapatan

Tujuan penyusunan pendapatan adalah:

- a. Memberikan informasi prosedur yang baku atas aktiva yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, mulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya.
- b. Memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda), sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh pemda untuk membiayai kegiatan pemda seperti yang dianggarkan.

2.1.4 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang bersala dari kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana serta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dibagi menjadi 2 yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan secara langsung dengan program kerja sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan perogram kerja. (Biduri, 2018:111)

Adanya belanja daerah yang dianggarkan APBD agar dijadikan pedoman sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan sebagai pelaksanaan urusan pemerintah daerah seperti provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan peraturan yang telah berlaku.
- b. Belanja sebagai pelaksanaan urusan wajib dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat sebagai tanggungjawab memenuhi kewajiban daerah yang meliputi pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta jaminan sosial masyarakat.
- c. Penyusunan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi pada output yang dicapai serta perencanaan berdasarkan outcome. Hal ini dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD sebagai pelaksanaan tugas pemerintah.

Adapun setiap SKPD diukur berdasarkan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

- e. Belanja daerah menyediakan dana untuk penanggulangan bencana alam/sosial atau diberikan pada daerah lain yang terdampak bencana alam/sosial dengan memanfaatkan saldo APBD tahun sebelumnya atau bisa pula melakukan belanja tak terduga dengan melakukan jadwal ulang terhadap program kegiatan yang kurang mendesak.

Dalam rangka memudahkan penilaian kinerja pelaksanaan program, maka biaya dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan), bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai (honorium/upah), belanja barang dan jasa serta belanja modal. (Hasanah dan Fauzi, 2016: 136).

2.1.5 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya system pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangan. Untuk melihat gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan,

perluadanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan bagian dari pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2018:151).

Salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan secara luas telah banyak digunakan dan diterapkan pada perusahaan yang bersifat komersil. Sedangkan pada lembaga publik, khususnya pada pemerintah daerah penggunaan analisis rasio keuangan masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio keuangan laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2014:150).

2.1.6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No. 19 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (10) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan oleh pemerintah daerah tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti (Ramli, 2016:5).

Menurut Kasmir (2017:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2017:22) laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik (Ramli 2016:15). Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara berikut ini:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

PP No. 231/PMK.07/2020 Pasal 2 ayat (2) tentang komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah bagi para pengguna laporan yaitu untuk menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan

kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

4. Catatan atas Laporan keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi dan mengungkapkan kebijakan serta

menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan. Selain itu CaLK memberikan penjelasan dan informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan. Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan Negara/Daerah.

2.1.7 Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis pendapatan belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah melakukan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran menghindari pengeluaran secara tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi dari laporan realisasi anggaran, dapat dianalisis kinerja anggaran dengan beberapa analisis sebagai berikut:

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Mahmudi (2019, hal 135) mengemukakan bahwa analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Analisis selisih anggaran pendapatan dapat dilakukan menggunakan beberapa langkah berikut ini: pertama, membandingkan antara anggaran dan realisasi pendapatan, jika terdapat selisih kemudian tentukan selisihnya berdasarkan persentase atau nominal. Setelah menentukan kewajaran selisih tersebut, bandingkan selisih tersebut dengan total pendapatan apakah signifikan atau tidak

signifikan. Langkah terakhir dari analisis selisih anggaran yaitu cari akar masalah penyebab selisih tersebut terjadi.

2. Analisis *Varians* (Selisih) Belanja Daerah

Analisis selisih belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, maka dapat diketahui secara langsung *varians* belanja antara anggaran belanja dan realisasinya yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasinya. Kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik jika realisasi belanja lebih kecil dari yang dianggarkan, jika sebaliknya maka mengindikasikan kinerja yang kurang baik.

3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Mahmudi (2019, hal 137) menyebutkan bahwa analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah pusat/daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah atau karena manajemen keuangan pemerintah yang kurang baik (Mahmudi, 2019, hal 137).

4. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun mengenai seberapa besar anggaran dan realisasi yang

terwujud. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka mencegah dapat mengganggu keseimbangan dan kesehatan fiskal daerah (Mahmudi, 2011:162).

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang akan diuraikan secara ringkas karena penelitian yang akan dilakukan mengacu pada penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan baik dari segi objek maupun dari segi waktu penelitian. Seperti pada penelitian terdahulu ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|----|----------------------|--|--------------------|--|
| 1 | Evi Nila Sari (2021) | Analisis Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang | Metode Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Analisis Varians Pendapatan menghasilkan rata-rata sebesar 93,64% yang artinya kinerja keuangan pendapatan dikatakan belum baik, 2) Analisis Varians Belanja menghasilkan rata-rata sebesar 90,95% yang artinya kinerja keuangan belanja pemerintah daerah dikatakan sudah baik, 3) Analisis Pertumbuhan |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | | Pendapatan menghasilkan pertumbuhan positif dengan rata-rata yaitu 3,78%, 4) Analisis Pertumbuhan Belanja menghasilkan pertumbuhan positif dengan rata-rata yaitu 4,49% |
| 2 | Rani Febri Ramadani , Elfreda Aplonia Lau, Suyatin (2020) | Analisis Kinerja Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda | Analisis deskriptif kuantitatif | Dari hasil penelitian berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran di BAPPELIBANG Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi Laporan Reaisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan selama tahun anggaran 2011 sampai tahun 2015 rata-rata berada pada tingkat 90%-100%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisien Laporan Realisasi Anggaran di BAPPELIBANG Kabupaten Minahasa Utara selama tahun anggaran 2011 sampai tahun 2015 pada tingkat 100% yaitu sangat efektif. |
| 3 | Umar Basni (2017) | Analisis Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Pemerintah | Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis varians pendapatan bersaldo negatif, hal ini mengindikasikan kinerja pendapatan cukup baik meskipun belum mampu memperoleh pendapatan sesuai dengan yang dianggarkan. Rasio ketergantungan menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya dalam melaksanakan tugasnya tidak bergantung pada pemerintah pusat. Analisis varians belanja bersaldo negative yang mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. |

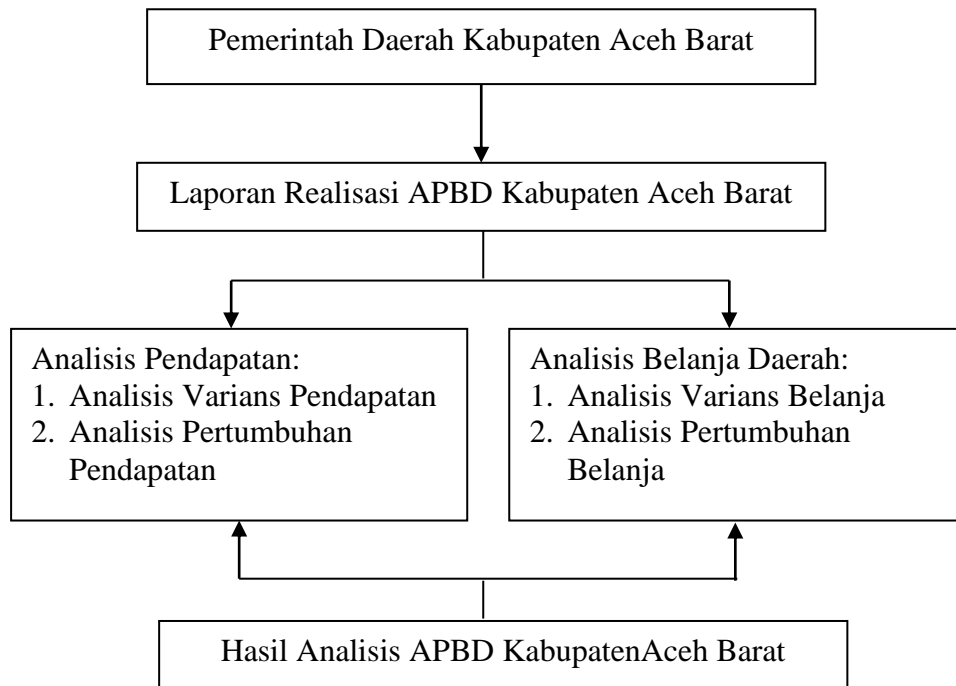
| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 4 | Anak Agung Ayu Nityasari dkk (2016) | Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah | Analisis deskriptif kualitatif | Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab selisih anggaran dengan realisasi dari segi transparansi, akuntabel, ekonomis, keefektifan, dan efisien. Namun secara garis besar dibalik permasalahan yang dialami yang mempengaruhi realisasi anggaran, Dinas PU Denpasar terbilang cukup baik. |
| 5 | Andre P. Tulangow dan Treesje Runtu (2018) | Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa | Deskriptif | Hasil penelitian pada APBD Kabupaten Minahasa, menunjukkan bahwa dalam tiga tahun penelitian pemerintah Kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun penelitian Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah baik dalam merealisasikan belanjanya dengan tidak melebihi dengan jumlah yang dianggarkan |
| 6 | Wilis Auliana (2020) | Analisis Perencanaan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2018 | Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. | Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Malang dikatakan baik dalam menjalankan kinerja keuangan, tetapi sedikit evaluasi yang harus diperbaiki dalam mengelola desentralisasi, PAD, dan perbedaan pendapatan. 22 Kabupaten Malang Tahun 2016-201 Kinerja Kabupaten Malang APBD pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja dikatakan efisien, karena tidak menunjukkan pemborosan anggaran. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Malang untuk 3 tahun berjalan efektif dengan menyajikan Laporan |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan prosedur yang berlaku |
|--|--|--|--|--|

Sumber: Data diolah 2022

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintahan pada daerah tersebut. Dalam memudahkan penelitian ini menggunakan alur kerangka konsep yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Suliyanto (2018: 115) menjelaskan desain penelitian sebagai pedoman kerja dalam melakukan penelitian yang bertujuan agar penelitian berjalan efektif dan efisien. Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sugiyono (2019:2) mengemukakan bahwa. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Menurut Sekaran (2016:118), desain atau rancangan suatu penelitian harus memuat: 1) tujuan studi; 2) tipe penelitian; 3) luas intervensi penelitian; 4) lingkungan studi; 5) unit analisis; 6) horizon waktu. Berikut penjelasan masing-masing desain penelitian:

1) Tujuan studi, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2017 sampai dengan 2021.

2) Jenis Investigasi, Dalam penelitian ini, jenis investigasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani, 2020:54).

3) Setting Penelitian, penelitian ini dilakukan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) dan kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat

4) Tingkat keterlibatan peneliti, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Peneliti hanya mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisisnya, sehingga peneliti tidak ada intervensi apapun.

5) Unit analisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

6) Horizon Waktu, Horizon waktu penelitian ini menggunakan model deret waktu (*time series*), karena menggunakan kurun waktu dari tahun 2017-2021.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Cooper dan schindler (2007), populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Sugiyono (2017:80), menyatakan bahwa populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2017 sampai dengan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Menurut Sugiyono (2018: 120) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan bagian pupulasi yang hendak diuji karakteristiknya (Suliyanto, 2018:177).

Berdasarkan pendapat diatas maka yang ditetapkan menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2017 sampai dengan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan realisasi anggaran dalam bentuk laporan tahunan yang diambil dari laporan realisasi anggaran yang dijadikan sampel pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

3.3.2 Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan metode dokumentasi. Menurut Hardani (2020:149) dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi pada penelitian ini ialah dengan cara melihat data dari dokumen-dokumen berupa laporan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2017-2021.

3.4 Defenisi Operasional Variabel

1. Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter.

2. Pendapatan adalah jumlah penerimaan rekening kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih.
3. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Varians adalah perbedaan antara rencana atau target yang dianggarkan dengan suatu hasil yang dicapai.
5. Pertumbuhan adalah peningkatan anggaran yang terjadi tiap tahunnya apakah terjadi pertumbuhan yang positif dan negatif. Dan menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode kualitatif. Proses analisa data dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan dan mengolah data pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggunakan beberapa analisis sebagai berikut:

1. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan

terlampau, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian (Mahmudi, 2016). Analisis selisih ini dapat dihitung menggunakan analisis varians pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

Untuk menghitung persentase tingkat ketercapaian Pendapatan:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan tahun } t} \times 100\%$$

Berdasarkan selisih baik (*favourable*) atau kurang baik (*unfavourable*) realisasi dengan anggaran pendapatan maka penilaian kinerja dari analisis varians pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Kinerja Varians Pendapataan

| Kriteria Varians Pendapatan | Ukuran |
|-------------------------------------|--|
| Baik (<i>favourable</i>) | Realisasi Pendapatan > Anggaran Pendapatan |
| Kurang Baik (<i>unfavourable</i>) | Realisasi Pendapatan < Anggaran Pendapatan |

(Sumber: Mahmudi, 2016)

2. Analisis Varians Belanja

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan. Pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran, kedua justru sebaliknya. Jika terjadi selisih kurang maka sangat memungkinkan telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal sudah diamanatkan dalam anggaran (Mardiasmo, 2011). Analisis terhadap

perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dapat dihitung dengan menggunakan analisis varians belanja yaitu sebagai berikut:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Untuk menghitung persentase tingkat ketercapaian belanja:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi Belanja tahun } t}{\text{Anggaran Belanja tahun } t} \times 100\%$$

Berdasarkan selisih baik (*favourable*) dan kurang baik (*unfavourable*) realisasi dengan anggaran belanja maka penilaian kinerja dari analisis varians belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

| Kriteria Varians Belanja | Ukuran |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Baik (<i>favourable</i>) | Realisasi Belanja < Anggaran Belanja |
| Kurang Baik (<i>unfavourable</i>) | Realisasi Belanja > Anggaran Belanja |

(Sumber: Mahmudi, 2015)

3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan memiliki tujuan yang diantaranya adalah guna memahami dalam suatu tahun anggaran apakah terjadi pertumbuhan yang negatif atau positif dalam kinerja anggaran (Mahmudi, 2016). Secara ideal, pendapatan tersebut dapat tumbuh dan diharapkan bisa cenderung meningkat serta hasil yang positif. Namun, apabila hasil negatif yang ada atau tumbuh, hal tersebut akan mengindikasikan terjadinya kinerja yang turun serta harus dapat diketahui faktor yang memicu hal itu. Analisis pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t - \text{Realisasi Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Berdasarkan pertumbuhan realisasi pendapatan baik berupa kenaikan atau penurunan pendapatan selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Pendapatan

| Kriteria Pertumbuhan Pendapatan | Ukuran |
|---------------------------------|---------|
| Naik | Positif |
| Turun | Negatif |

(Sumber: Mahmudi, 2016)

4. Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan (Mahmudi, 2015).

Pertumbuhan anggaran belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Prinsip pertumbuhan belanja harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal terjaga. Analisis pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } (t-1)}{\text{Realisasi Belanja Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

| Kriteria Pertumbuhan Pendapatan | Ukuran |
|---------------------------------|---------|
| Naik | Negatif |
| Turun | Positif |

(Sumber: Mahmudi, 2015)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Barat

Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. terletak sekitar 175 km tenggara kota Banda Aceh di pulau sumatera. Kabupaten Aceh Barat merupakan kota kelahiran pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh Barat Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibukotanya Tapak Tuan.

Pemekaran wilayah terjadi karena adanya ketimpangan-ketimpangan pembangunan dan tidak meratanya sektor-sektor pembangunan di semua wilayah, sementara potensi yang dimiliki wilayah memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber penghasilan pembangunan.

Pada Tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibukotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu kotanya Sinabang.

Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang N0.4 Tahun 2002.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang beribukota Kota Meulaboh. Letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada $04^{\circ}61'$ - $04^{\circ}47'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}00'$ - $86^{\circ}30'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km². mekarnya Desa Keuramat pada tahun 2015, Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 kecamatan, 36 mukim dan 322 gampong. Sebanyak 192 desa diantaranya berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah. Hanya 47 desa yang terletak di lereng: Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut (BPS Aceh Barat, 2021). Secara administratif Kabupaten Aceh Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas-Batas Wilayah Kabupaten Aceh Barat

| No | Batas | Berbatasan Dengan Wilayah |
|----|-----------------|--|
| 1 | Sebelah Utara | Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie |
| 2 | Sebelah Timur | Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya |
| 3 | Sebelah Selatan | Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya |
| 4 | Sebelah Barat | Samudera Indonesia |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Aceh Barat

Wilayah administratif terdapat dua belas kecamatan dan tiga ratus dua puluh dua gampong/desa di Kabupaten Aceh Barat serta dengan luas wilayah 2.927,95 km², adapun jumlah desa menurut kecamatan dan luas wilayah tersebut adalah sebagai berikut (BPS Aceh Barat, 2021) :

Tabel 4.2
Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Aceh Barat

| No | Kecamatan | Gampong/ Desa | Luas Wilayah (km ²) |
|----|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Johan Pahlawan | 21 | 44,91 |
| 2 | Samatiga | 32 | 140,69 |
| 3 | Bubon | 17 | 129,58 |
| 4 | Arongan Lambalek | 27 | 130,06 |
| 5 | Woyla | 43 | 249,04 |
| 6 | Woyla Barat | 24 | 123,00 |
| 7 | Woyla Timur | 26 | 132,60 |
| 8 | Kaway XVI | 44 | 510,80 |
| 9 | Meureubo | 26 | 112,87 |
| 10 | Pante Ceureumen | 25 | 490,25 |
| 11 | Panton Reu | 19 | 83,04 |
| 12 | Sungai Mas | 18 | 781,73 |
| | Aceh Barat | 322 | 2.927,95 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Aceh Barat

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data

Menurut Mardiasmo (2018:98) menjelaskan bahwa anggaran adalah suatu pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada

masa depan dan pihak yang lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan diterima dalam masa tertentu.

Tabel 4.3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2017-2021

| Tahun | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2017 | PENDAPATAN | 1.422.813.210.350,69 | 1.364.768.498.288,08 |
| | Pendapatan Asli Daerah | 185.972.324.490,00 | 161.743.458.643,95 |
| | Pendapatan Transfer | 1.092.693.945.454,69 | 1.079.562.389.236,08 |
| | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 144.146.940.407,00 | 123.462.650.409,32 |
| | BELANJA | 1.408.155.278.726,00 | 1.353.268.625.048,00 |
| | Belanja Operasi | 940.115.079.703,00 | 881.623.394.806,00 |
| | Belanja Modal | 307.037.852.342,00 | 313.217.587.645,00 |
| | Belanja Tidak Terduga | 13.340.563.280,00 | 11.669.748.197,00 |
| | Transfer | 147.661.783.400,00 | 146.757.894.400,00 |
| 2018 | PENDAPATAN | 1.272.036.731.259,90 | 1.250.681.695.136,38 |
| | Pendapatan Asli Daerah | 165.425.983.311,00 | 150.499.049.235,64 |
| | Pendapatan Transfer | 1.079.632.291.187,00 | 1.065.883.307.195,74 |
| | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 26.978.456.761,90 | 34.299.338.705,00 |
| | BELANJA | 1.039.708.958.846,78 | 931.754.345.242,00 |
| | Belanja Operasi | 818.536.186.244,07 | 739.329.436.838,00 |
| | Belanja Modal | 206.924.209.322,00 | 192.424.908.404,00 |
| | Belanja Tak Terduga | 14.248.563.280,71 | 0,00 |
| | Transfer | 285.405.665.597,00 | 284.575.749.597,00 |
| 2019 | PENDAPATAN | 1.425.410.708.131,00 | 1.399.139.190.532,32 |
| | Pendapatan Asli Daerah | 166.876.962.235,00 | 153.799.291.478,27 |
| | Pendapatan Transfer | 1.228.083.345.896,00 | 1.212.988.590.608,05 |
| | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 30.450.400.000,00 | 32.351.308.446,00 |
| | BELANJA | 1.193.075.439.237,26 | 1.052.106.351.389,69 |
| | Belanja Operasi | 874.689.699.756,26 | 788.592.427.328,69 |
| | Belanja Modal | 317.507.572.481,00 | 263.508.924.061,00 |

| | | | |
|------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Belanja Tak Terduga | 878.197.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Transfer | 315.694.414.109,00 | 314.654.428.124,00 |
| 2020 | PENDAPATAN | 1.319.983.684.574,00 | 1.327.545.973.658,59 |
| | Pendapatan Asli Daerah | 159.371.121.210,00 | 149.925.456.946,59 |
| | Pendapatan Transfer | 1.132.215.885.364,00 | 1.151.144.316.712,00 |
| | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 28.396.678.000,00 | 26.476.200.000,00 |
| | BELANJA | 1.104.772.167.316,89 | 993.468.521.285,57 |
| | Belanja Operasi | 810.155.630.816,89 | 720.662.431.926,46 |
| | Belanja Modal | 291.616.536.500,00 | 271.982.384.493,11 |
| | Belanja Tak Terduga | 3.000.000.000,00 | 823.704.866,00 |
| | Transfer | 337.689.154.357,00 | 336.783.455.046,00 |
| 2021 | PENDAPATAN | 1.321.062.239.778,00 | 1.340.506.333.454,01 |
| | Pendapatan Asli Daerah | 137.850.088,304,00 | 134.639.234.284,01 |
| | Pendapatan Transfer | 1.155.042.388.339,00 | 1.177.998.271.745,00 |
| | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 28.169.763.135,00 | 27.868.827.425,00 |
| | BELANJA | 1.398.380.314.532,00 | 1.343.673.446.864,00 |
| | Belanja Operasi | 750.833.637.075,00 | 697.915.103.852,00 |
| | Belanja Modal | 286.598.341.099,00 | 289.193.079.623,00 |
| | Belanja Tak Terduga | 3.000.000.000,00 | 288.863.467,00 |
| | Transfer | 357.948.336.358,00 | 356.276.399.922,00 |

Sumber : Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Aceh Barat

Dari tabel diatas, dapat diketahui pada anggaran dan realiasi pendapatan dan belanja daerah 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan (*fluktuasi*) tiap tahunnya. Hal ini terjadi akibat perubahan harga (inflasi) yang langsung muncul di masyarakat karena patokan nilai yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan harga barang menjadi berubah. Sehingga alokasi anggaran lebih besar dan tidak sesuai dengan yang telah dianggarkan. Sebaliknya bisa saja penyerapan anggaran yang tidak ekonomis disebabkan kinerja yang kurang baik atau adanya program

yang tidak dijalankan sehingga menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kinerja instansi tidak berjalan sesuai rencana.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians pendapatan adalah selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

Tabel 4.4
Perhitungan Varians Pendapatan Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Varians Pendapatan (Rp) | (%) | Kriteria |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| 2017 | 1.422.813.210.350,69 | 1.364.768.498.288,08 | (58.044.712.062,6) | 95,92 | Kurang Baik |
| 2018 | 1.272.036.731.259,90 | 1.250.681.695.136,38 | (21.355.036.123,5) | 98,32 | Kurang Baik |
| 2019 | 1.425.410.708.131,00 | 1.399.139.190.532,32 | (26.271.517.598,7) | 98,15 | Kurang Baik |
| 2020 | 1.319.983.684.574,00 | 1.327.545.973.658,59 | 7.562.289.085,59 | 100,5 | Baik |
| 2021 | 1.321.062.239.778,00 | 1.340.506.333.454,01 | 19.444.093.676 | 101,4 | Baik |
| Rata-Rata | 1.352.261.314.819 | 1.336.528.338.214 | (15.732.976.608) | 9,88 | Kurang Baik |

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui, rata-rata anggaran pendapatan tahun 2017-2021 sebesar Rp 1.352.261.314.819 dengan tingkat realisasi sebesar Rp1.336.528.338.214 dengan persentase sebesar 9,88%. Varians ini dapat dikategorikan kurang baik (*unfavourable*) karena realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini tidak mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Hal ini berarti pemerintah mampu

mengelola dan mengoptimalkan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil dan kinerja.

4.3.2 Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja adalah analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan.

Tabel 4.5
Perhitungan Varians Belanja Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Varians Belanja (Rp) | (%) | Kriteria |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| 2017 | 1.464.801.068.660,89 | 1.353.258.094.692,40 | (111.542.973.968) | 92,38 | Baik |
| 2018 | 1.039.708.958.846,78 | 931.754.345.242,00 | (107.954.613.605) | 89,61 | Baik |
| 2019 | 1.193.075.439.237,26 | 1.052.106.351.389,69 | (140.969.087.848) | 88,18 | Baik |
| 2020 | 1.104.772.167.316,89 | 993.468.521.285,57 | (111.303.646.031) | 89,92 | Baik |
| 2021 | 1.421.161.267.425,91 | 1.338.446.864.092,44 | (82.714.403.333) | 94,18 | Baik |
| Rata-Rata | 1.244.703.780.298 | 1.133.806.835.340 | (110.896.944.958) | 91,09 | Baik |

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui, rata-rata anggaran belanja tahun 2017-2021 sebesar Rp 1.244.703.780.298 dengan tingkat realisasi sebesar Rp 1.133.806.835.340 dengan persentase sebesar 91,09%. Varians ini dapat dikategorikan baik (*favourable*) karena realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Mahmudi (2016:155) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Hal ini berarti Pemerintah Daerah dapat mengendalikan dan melakukan penghematan belanja sehingga tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

4.3.3 Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan realisasi pendapatan dari tahun ke tahun.

Tabel 4.6
Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021

| Tahun | Realisasi | Pertumbuhan Pendapatan (%) | Kriteria |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 2016 | 1.295.102.715.309, 55 | – | – |
| 2017 | 1.364.768.498.288,08 | 5,38 | Positif |
| 2018 | 1.250.681.695.136,38 | (8,36) | Negatif |
| 2019 | 1.399.139.190.532,32 | 7,07 | Positif |
| 2020 | 1.327.545.973.658,59 | (0,86) | Negatif |
| 2021 | 1.340.506.333.454,01 | 0,98 | Positif |
| Rata-Rata | 1.336.528.338.214 | 8,42 | Positif |

Sumber: Data diolah 2022

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui, analisis pertumbuhan pendapatan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,38% yang artinya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendapatan sudah baik sehingga realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang, pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -8,36% yang artinya pemerintah daerah belum mampu menggali potensi pendapatan asli daerah dalam menambah sumber pendapatan sehingga realisasi pada tahun sebelumnya lebih besar dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,07% yang artinya kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan sudah baik sehingga realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang, pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,86% yang artinya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan sudah baik sehingga realisasi pada tahun sebelumnya lebih

kecil dari tahun sekarang, dan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,98% hal ini menunjukkan kemampuan kinerja pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan anggaran yang sudah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya dengan pertumbuhan yang baik untuk setiap komponen pendapatan sehingga realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil dibandingkan tahun setelahnya.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Fitra (2019) yaitu pertumbuhan pendapatan yang positif menunjukkan kinerja yang bagus karena realisasi pendapatan tahun sekarang lebih tinggi dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

4.3.4 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan realisasi belanja dari tahun ke tahun.

Tabel 4.7
Perhitungan Pertumbuhan Belanja Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021

| Tahun | Realisasi | Pertumbuhan Belanja (%) | Kriteria |
|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 2016 | 1.329.720.164.897,00 | – | – |
| 2017 | 1.353.258.094.692,40 | 17,70 | Positif |
| 2018 | 931.754.345.242,00 | (31,14) | Negatif |
| 2019 | 1.052.106.351.389,69 | 12,91 | Positif |
| 2020 | 993.468.521.285,57 | (5, 58) | Negatif |
| 2021 | 1.338.446.864.092,44 | 34,72 | Positif |
| Rata-Rata | 1.133.806.835.340 | 57,22 | Positif |

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,84% yang artinya kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran belanja sudah baik sehingga

realisasi pada tahun sekarang lebih besar dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -31,14% yang artinya kinerja pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola anggaran belanja sehingga realisasi pada tahun 2016 lebih besar dibandingkan tahun 2017, pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,91% yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah sudah baik dalam melakukan penghematan yang tidak mengurangi proporsi pembelanjaan sehingga realisasi pada tahun sekarang lebih besar dari pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,58% yang artinya kinerja pemerintah daerah dalam mengupayakan penghematan anggaran belanja belum dikatakan baik karena realisasi pada tahun sebelumnya lebih besar dari tahun sekarang, dan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 34,72% hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja dalam APBD semakin baik karena realisasi belanja pada tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan Mahmudi (2016:158) yaitu analisis pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ketahun. Belanja daerah biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa pembahasan terkait hasil analisis tersebut yakni sebagai berikut:

4.4.1 Analisis Varians Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian diatas Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa varians pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp 95,92% dapat dikatakan kurang baik karena realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan, pada tahun 2018 sebesar 95,15% dapat dikatakan kurang baik karena anggaran lebih besar dari realisasi yang telah ditetapkan, pada tahun 2019 sebesar 98,15% dapat dikatakan kurang baik karena realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran yang telah ditentukan, pada tahun 2020 sebesar 100,5% dapat dikatakan baik karena realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, dan pada tahun 2021 sebesar 101,4% hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019 makna dari varians ini masuk dalam kategori selisih kurang baik (*unfavourable*) karena secara keseluruhan realisasi pendapatan dibawah jumlah yang telah dianggarkan. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, realisasi pendapatan dikatakan baik karna melebihi jumlah yang telah dianggarkan.

Pada prinsipnya, realisasi anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Suatu pemerintah dapat dikatakan baik dalam mengelola sumber pemasukannya, apabila realisasi pendapatan daerahnya melebihi jumlah yang dianggarkan. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan optimal dalam memperoleh pendapatan karena pada tahun 2020 dan 2021 telah melebihi target yang dianggarkan. Hasil penelitian ini belum mendukung pendapat yang dikemukakan Mahmudi (2016) bahwa analisis varians pendapatan dikatakan sudah baik apabila pemerintah daerah mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang telah dianggarkan.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Layuk (2019:4) menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Pengunungan Bintang dilihat dari varians pendapatan belum optimal dalam memperoleh pendapatan terlihat dari masih adanya kondisi selisih tidak menguntungkan. Sedangkan kinerja keuangan pendapatan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dilihat dari varians pendapatan daerah selama tahun 2010-2014, secara umum dapat dikatakan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi APBD Kota Samarinda sebesar 1.17% (Ramadani et al. 2016).

Sementara hasil penelitian yang dilakukan Fitra (2020:14) Kabupaten Solok selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan kinerja pendapatan pemerintah daerah yang belum efektif dalam meningkatkan capaian realisasi pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah sehingga menghasilkan selisih yang tidak menguntungkan. Sedangkan pemerintah Kota Surabaya selama periode 2012-2013 terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo negatif sehingga mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan yang cukup baik walaupun masih belum mampu memperoleh pendapatan yang sesuai dengan jumlah yang dianggarkan (Basni, 2017:6).

4.4.2 Analisis Varians Belanja

Berdasarkan hasil penelitian diatas Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa varians belanja pada tahun 2017 sebesar 92,38% dikatakan baik karena realisasi belanja lebih kecil dari yang dianggarkan, pada tahun 2018 sebesar 89,61% dikatakan baik karena realisasi belanja lebih kecil dari yang ditetapkan, pada tahun 2019 sebesar 88,18% dikatakan baik karena realisasi belanja lebih kecil dari yang ditentukan,

pada tahun 2020 sebesar 89,92% dikatakan baik karena realisasi belanja lebih kecil dari yang telah dianggarkan, dan pada tahun 2020 sebesar 94,18% hal ini menunjukkan bahwa varians ini masuk dalam kategori baik/selisih menguntungkan (*favourable*) karena realisasi belanja lebih kecil dari yang dianggarkan.

Suatu pemerintah dapat dikatakan baik dalam mengelola sumber pengeluarannya, apabila realisasi belanja daerahnya tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat mampu memanfaatkan dan menghemat anggaran belanja sehingga tidak melebihi dari anggaran yang ditentukan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan Mahmudi (2016:155) yaitu apabila terdapat selisih kurang atau realisasi belanja kurang dari jumlah yang telah dianggarkan maka kinerja keuangan belanja daerah dapat dikatakan sudah baik.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ramadani et al (2016) kinerja belanja Kota Samarinda dilihat dari varians belanja dikatakan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja selama periode 2010-2014 dengan angka rata-rata 9.48%. Sedangkan hasil analisis varians belanja menunjukkan kinerja belanja pada Pemerintah Probolinggo dapat dikatakan kurang baik, karena hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran atau masih adanya program/kegiatan yang belum dilaksanakan (Hasanah et al, 2016).

Sementara hasil penelitian Melinda (2017) menunjukkan kinerja belanja pada Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dilihat dari varians belanja dapat dikatakan cukup baik/menguntungkan karena Pemerintah Daerah Kutai

Kartanegara mampu merealisasikan belanjanya terlihat bahwa realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan analisis varians belanja pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan kurang efisien karena belum mampu menghemat anggaran belanja. Hal ini terlihat dari adanya angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang ditargetkan (Fitra, 2020:14).

4.4.3 Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian diatas Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,38% yang artinya realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang, pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -8,36% dikarenakan realisasi pada tahun sebelumnya lebih besar dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,07% yang artinya realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang, pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,86% yang artinya realisasi pada tahun sebelumnya lebih besar dari tahun sekarang dan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,98% yang artinya realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil dibandingkan tahun setelahnya.

Pada tahun 2018 dan 2020 mengalami pertumbuhan negatif karena disebabkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas aparatur penganggaran di tingkat SKPK relatif belum memadai
2. Potensi PAD belum terdata secara optimal
3. Regulasi pengelolaan PAD belum memadai

4. Belum optimalnya penatausahaan pendapatan daerah pada SKPK yang mengelola PAD
5. Dalam pelaksanaan APBK tidak digunakan secara optimal
6. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dan OPD
7. Kemampuan pengelolaan keuangan pada SKPK belum optimal.

Suatu pemerintah dikatakan baik apabila dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam mengelola anggaran selama beberapa periode agar menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang positif. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat sudah baik dalam mempertahankan dan meningkatkan sumber daya pendapatan daerahnya, dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,42%.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan Fitra (2019) yaitu pertumbuhan pendapatan dapat dikatakan positif apabila realisasi pendapatan tahun sekarang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ramadani et al (2016) menunjukkan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum mengalami *fluktuasi* (naik turun). Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan positif meningkat yaitu 16.75%. Sedangkan Kinerja Keuangan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pengunungan Bintang mengalami pertumbuhan penurunan yang signifikan.

Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pemerintah dalam menggali potensi PAD di Daerah dalam menambah sumber pendapatan pemerintah daerah (Layuk, 2019:4). Sementara hasil penelitian Setiani et al (2019:12) menunjukkan

pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Cimahi 2009-2018 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan positif, artinya Pemerintah Kota Cimahi dikatakan cukup baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan pertumbuhan realisasi pada kabupaten Solok Selatan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5.45%. Pertumbuhan realisasi yang positif akan berdampak baik terhadap penggunaan anggaran seperti pengeluaran dan pembiayaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Fitra, 2020:14).

4.4.4 Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan hasil penelitian diatas Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif sebesar 17,70% yang artinya bahwa realisasi pada tahun sekarang lebih besar dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -31,14% dikarenakan realisasi pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,91% yang artinya bahwa realisasi pada tahun sekarang lebih besar dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,58% yang artinya bahwa realisasi pada tahun sekarang lebih kecil dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 34,72% yang artinya realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil dibandingkan tahun setelahnya. Pada tahun 2018 dan 2020 mengalami pertumbuhan belanja negatif karena disebabkan adanya kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Salah

satunya adalah pertanggungjawaban belanja hibah belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Suatu pemerintah dikatakan baik apabila dapat menyesuaikan inflasi dan penyesuaian faktor makro ekonomi lainnya sehingga pertumbuhan belanja dan pertumbuhan pendapatan seimbang. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja daerah secara efisien setiap tahunnya, dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 57,22%. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan Mahmudi (2016:158) yaitu pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan positif disebabkan realisasi pada tahun sekarang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ramadani et al. (2016) menunjukkan Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda dilihat dari Pertumbuhan belanja selama tahun 2010-2014, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu 18.26%. Sedangkan Kinerja Keuangan Belanja mengalami pertumbuhan negatif secara umum Pemerintah Kabupaten Pengunungan Bintang kurang mengupayakan pemanfaatan belanja dalam APBD yang memadai sehingga menunjukkan hasil yang berbeda selama periode 4 tahun (Layuk, 2019:4).

Sementara hasil penelitian yang dilakukan Hasanah (2018:6) pada Pemerintah Probolinggo menunjukkan pertumbuhan belanja yang positif dalam meningkatkan pembangunan daerah dan melakukan penghematan yang tidak mengurangi proporsi pembelanjaan. Sedangkan analisis pertumbuhan belanja

Pemerintah Kota Cimahi periode 2009-2018 mengalami *fluktuasi* dengan pertumbuhan positif, artinya Pemerintah Kota Cimahi dalam mengelola pengeluaran belanja daerah dikatakan cukup baik dalam merealisasikan belanja daerahnya (Setiani et al, 2019:12).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari Varians Pendapatan selama tahun anggaran 2017-2021 menghasilkan rata-rata sebesar 9,88%. Yang artinya kinerja keuangan pendapatan pemerintah daerah belum dikatakan baik, karena varians pendapatan dikatakan baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan.
2. Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari Varians Belanja selama tahun anggaran 2017-2021, menghasilkan rata-rata sebesar 91,09%. Yang artinya kinerja keuangan belanja pemerintah daerah dapat dikatakan sudah baik, karena realisasi belanja tidak melebihi target anggaran yang telah ditetapkan.
3. Penggunaan Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan selama tahun anggaran 2017-2021 menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 8,42%. Yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan cukup baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya karena realisasi pada tahun sebelumnya lebih kecil dari tahun sekarang.
4. Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dilihat dari Pertumbuhan Belanja selama tahun anggaran 2017-2021

menghasilkan rata-rata pertumbuhan positif yaitu 57,22%. Yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan cukup baik dalam merealisasikan belanja daerahnya karena realisasi pada tahun sekarang lebih besar dari tahun sebelumnya dalam mengelola belanja daerah baik belanja modal, belanja pegawai dan belanja tak terduga. Hal ini dikarenakan pertumbuhan pendapatan daerah juga mengalami pertumbuhan positif yang menyebabkan tata kelola keuangan daerah dari segi pemasukan maupun pengeluaran sudah baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan mengoptimalkan penerimaan serta potensi pendapatan yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan penggunaan anggaran belanja secara efisien serta pengendalian dan pengawasan dalam mengelola anggaran untuk menunjang pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. (2012)a. Perilaku *Oportunistik Legislatif* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. *Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada*.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anak agung ayu nitya saridewi, pier sandreas noak, dan Niwayan supriyanti. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Universitas Udayana.
- Andre P. Tulangow. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1*, Hal. 564-571
- Bastian. (2018). Anggaran Sebagai Rencana Operasi Keuangan Sumber Pendapatan
- Biduri, Sarwenda. (2018). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Cooper, Donald R & Schindler, dan Pamela S. (2007). *Business Research Methods*. Mcgrow-Hill, Irwin, Boston.
- Dwi Martani, dkk. (2014). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Evi Nila Sari. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Halim.(2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2016). *Incremental Budget*. Jurnal Manajemen dan Sains Vol. 142. No.1
- Halim dan Kusufi. (2016). *Definisi Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2017). *Fungsi Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. (2017). *Alasan Mengapa Anggaran Dianggap Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2017). Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.*Disertasi Program Doktor Universitas Gadjah Mada*.

- Halkadri Fitra. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Vol. XIV. No. 01
- Hardani., Auliya, N.H., Andriani, H., Fardani, R.A., Ustiawaty, J., et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasanah, Nuramalia dkk.(2016). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: In Media.
- Indriani Amanda. (2019). Rencana pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
- Lontaan, I, & Pangerapan, S (2016). *Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014*. Jurnal EMBA Vol.4 No.1, 900-901.
- Mahmudi.(2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- (2015). Analisis Varians Belanja dan Analisis Pertumbuhan Belanja. Penerbit UPP STIM YKPN,
- (2016). Analisis Varians Belanja dan Analisis Pertumbuhan Belanja. Penerbit UPP STIM YKPN,
- (2016). Analisis Varians Pendapatan dan Analisis Pertumbuhan Pendapatan. Penerbit UPP STIM YKPN,
- (2019). Ukuran Kinerja Untuk Memberikan Arah. Jurnal Manajemen dan Sains. Vol. 45. No.2
- (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YPKN,
- Mardiasmo. (2011). *Analisis Varians Belanja*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- (2018). Definisi Anggaran. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.Vol. 98 No.2
- (2019:61). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Melinda. (2017). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara
- Nafarin, M. (2019).*Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Hasanah. (2016). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. Jurnal Ecobuss.

- _____ (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Jurnal Ecobuss*. Vol. 6. No. 2
- Paulus K. Allo Layuk. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pungung Bintang. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*. Vol. 4. No. 1
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor. 231/PMK.07/2020 tentang Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- PSAK Nomor. 23 Tahun 2009 tentang Pendapatan Daerah
- Rani Febri Ramadani. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda
- Sasongko dan Parulian. (2015). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. (2016). *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta., Salemba Empat.
- Setyaningrum, dkk (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 9 No. 2. Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung
- _____ (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- _____ (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. Adi Offset.
- Tia Setiani. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018. *Jurnal Akuntansi*. Vol. XII. No. 02.
- Umar Basni. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6. No. 12.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wilis Auliana. (2020). Analisis Perencanaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Lampiran 1: Data Penelitian Tahun 2017

DATA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017

| PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 Desember s.d 31 Desember 2017 | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | PERSENTASE (%) | LEBIH / (KURANG) |
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | | |
| 4 | PENDAPATAN - LRA | 1,422,813,210,350.69 | 1,134,964,404,378.94 | 229,804,093,909.14 | 1,364,768,498,288.08 | 95.92 | (58,044,712,062.61) |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 1,185,972,324,490.00 | 1,119,041,465,546.81 | 42,699,993,057.14 | 1,161,741,458,603.95 | 86.97 | (62,437,965.87) |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 27,494,000,000.00 | 25,986,810,748.07 | 2,330,627,157.00 | 28,317,437,905.07 | 102.25 | 62,437,905.07 |
| 4.1.1.06 | Pajak Hotel - LRA | 186,000,000.00 | 184,023,000.00 | 22,412,000.00 | 206,435,000.00 | 110.99 | 20,435,000.00 |
| 4.1.1.06.01 | Hotel - LRA | 150,000,000.00 | 149,423,000.00 | 18,112,000.00 | 167,535,000.00 | 111.69 | 17,535,000.00 |
| 4.1.1.06.03 | Losmen - LRA | 36,000,000.00 | 34,600,000.00 | 4,300,000.00 | 38,900,000.00 | 108.06 | 2,900,000.00 |
| 4.1.1.07 | Pajak Restoran | 2,330,000,000.00 | 1,966,843,169.40 | 563,885,043.50 | 2,530,728,212.90 | 108.61 | 200,728,212.90 |
| 4.1.1.07.01 | Restoran - LRA | 580,000,000.00 | 605,885,574.00 | 52,293,589.00 | 661,479,263.00 | 114.05 | 81,479,263.00 |
| 4.1.1.07.02 | Rumah Makan - LRA | 50,000,000.00 | 28,000,200.00 | 1,814,300.00 | 29,822,500.00 | 59.65 | (20,177,400.00) |
| 4.1.1.07.03 | Kafetaria - LRA | 50,000,000.00 | 71,600,000.00 | 8,550,000.00 | 79,610,000.00 | 159.22 | 29,610,000.00 |
| 4.1.1.07.05 | Warung | 1,650,000,000.00 | 1,258,589,235.40 | 501,227,154.50 | 1,759,816,389.90 | 106.66 | 109,816,389.90 |
| 4.1.1.08 | Pajak Hiburan - LRA | 50,000,000.00 | 46,300,000.00 | 5,138,563.00 | 51,528,563.00 | 103.06 | 1,528,563.00 |
| 4.1.1.08.02 | Pagerahan Kesenian/Musik/Tari/Budaya - LRA | 28,000,000.00 | 28,765,500.00 | 1,956,563.00 | 30,722,063.00 | 109.30 | 1,822,063.00 |
| 4.1.1.08.08 | Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Katagasan - LRA | 3,000,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 20.00 | (2,400,000.00) |
| 4.1.1.08.09 | Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA | 3,600,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 66.67 | (1,200,000.00) |
| 4.1.1.08.10 | Pertandingan Olahraga - LRA | 14,500,000.00 | 14,624,500.00 | 3,182,000.00 | 17,806,500.00 | 122.80 | 3,306,500.00 |
| 4.1.1.09 | Pajak Reklame - LRA | 332,000,000.00 | 321,382,900.17 | 12,461,645.00 | 333,844,545.17 | 100.56 | 1,844,545.17 |
| 4.1.1.09.01 | Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron - LRA | 240,000,000.00 | 234,800,688.17 | 11,140,895.00 | 245,941,583.17 | 119.14 | 45,941,583.17 |
| 4.1.1.09.02 | Reklame Kain - LRA | 80,000,000.00 | 34,912,250.00 | 1,308,750.00 | 36,233,000.00 | 40.26 | (53,767,000.00) |
| 4.1.1.09.03 | Reklame Hektar/Sektor - LRA | 2,000,000.00 | 11,669,962.00 | 0.00 | 11,669,962.00 | 583.50 | 9,669,962.00 |
| 4.1.1.10 | Pajak Penerangan Jalan - LRA | 7,000,000,000.00 | 7,290,535,365.00 | 751,700,931.00 | 8,042,236,296.00 | 114.89 | 1,042,236,296.00 |
| 4.1.1.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Dikelola Sendiri - LRA | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 4.1.1.11 | Pajak Parkir - LRA | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 4.1.1.11.01 | Pajak Parkir - LRA | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 4.1.1.12 | Pajak Air Tanah - LRA | 10,000,000.00 | 23,277,240.00 | 0.00 | 23,277,240.00 | 232.77 | 13,277,240.00 |
| 4.1.1.12.01 | Pajak Air Tanah - LRA | 10,000,000.00 | 23,277,240.00 | 0.00 | 23,277,240.00 | 232.77 | 13,277,240.00 |
| 4.1.1.13 | Pajak Sarang Burung Walet - LRA | 35,000,000.00 | 34,550,000.00 | 0.00 | 34,550,000.00 | 98.71 | (450,000.00) |
| 4.1.1.13.01 | Pajak Sarang Burung Walet - LRA | 35,000,000.00 | 34,550,000.00 | 0.00 | 34,550,000.00 | 98.71 | (450,000.00) |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | PERSENTASE (%) | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | | |
| 4.1.1.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA | 2,100,000,000.00 | 1,451,817,355.50 | 830,754,850.00 | 2,282,572,205.50 | 108.69 | 182,572,205.50 |
| 4.1.1.14.09 | Pajak Bahan Galian Gol. C - LRA | 2,100,000,000.00 | 1,451,817,355.50 | 830,754,850.00 | 2,282,572,205.50 | 108.69 | 182,572,205.50 |
| 4.1.1.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA | 2,600,000,000.00 | 1,234,094,135.50 | 106,010,324.50 | 1,340,104,460.00 | 51.54 | (1,259,895,540.00) |
| 4.1.1.15.01 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA | 2,600,000,000.00 | 1,234,094,135.50 | 106,010,324.50 | 1,340,104,460.00 | 51.54 | (1,259,895,540.00) |
| 4.1.1.16 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA | 13,050,000,000.00 | 13,433,897,582.00 | 38,263,800.00 | 13,472,161,382.00 | 103.23 | 422,161,382.00 |
| 4.1.1.16.01 | BPHTB | 13,050,000,000.00 | 13,433,897,582.00 | 38,263,800.00 | 13,472,161,382.00 | 103.23 | 422,161,382.00 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 9,315,320,584.00 | 4,563,056,189.00 | 670,313,875.00 | 5,233,370,064.00 | 56.18 | (4,081,950,520.00) |
| 4.1.2.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA | 2,499,660,000.00 | 1,332,449,500.00 | 215,797,000.00 | 1,548,246,500.00 | 61.94 | (951,413,500.00) |
| 4.1.2.01.01 | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LRA | 2,460,000,000.00 | 1,332,449,500.00 | 215,797,000.00 | 1,548,246,500.00 | 62.94 | (911,753,500.00) |
| 4.1.2.01.06 | Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yg dimiliki dan/atau dikelola oleh Penda - LRA | 39,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (39,660,000.00) |
| 4.1.2.02 | Retribusi Pelayanan Penampungan/Rehabilitasi - LRA | 582,750,000.00 | 504,542,500.00 | 62,360,000.00 | 566,902,500.00 | 97.28 | (15,847,500.00) |
| 4.1.2.02.01 | Pengambatan/Pengumpulan Sampah dan Sumbanya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA | 582,750,000.00 | 504,542,500.00 | 62,360,000.00 | 566,902,500.00 | 97.28 | (15,847,500.00) |
| 4.1.2.05 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA | 133,000,000.00 | 137,098,000.00 | 2,890,000.00 | 139,988,000.00 | 105.25 | 6,988,000.00 |
| 4.1.2.05.01 | Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA | 133,000,000.00 | 137,098,000.00 | 2,890,000.00 | 139,988,000.00 | 105.25 | 6,988,000.00 |
| 4.1.2.06 | Retribusi Pelayanan Pasar - LRA | 415,100,000.00 | 101,534,000.00 | 34,517,000.00 | 136,051,000.00 | 32.78 | (279,049,000.00) |
| 4.1.2.06.02 | Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA | 115,100,000.00 | 1,550,000.00 | 30,000,000.00 | 31,550,000.00 | 27.37 | (83,550,000.00) |
| 4.1.2.06.03 | Retribusi Pelayanan Pasar - Kos - LRA | 300,000,000.00 | 100,034,000.00 | 4,517,000.00 | 104,551,000.00 | 34.85 | (195,449,000.00) |
| 4.1.2.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA | 99,351,500.00 | 98,760,500.00 | 6,945,000.00 | 105,705,500.00 | 106.40 | 6,354,000.00 |
| 4.1.2.07.03 | Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA | 206,500.00 | 477,000.00 | 0.00 | 477,000.00 | 230.99 | 270,500.00 |
| 4.1.2.07.04 | Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA | 9,915,000.00 | 10,995,000.00 | 351,000.00 | 10,946,000.00 | 110.40 | 1,031,000.00 |
| 4.1.2.07.05 | Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA | 230,000.00 | 378,500.00 | 108,000.00 | 486,500.00 | 211.52 | 256,500.00 |
| 4.1.2.07.06 | Retribusi PKB - Mobil Barang/Bahan - Pkk Up - LRA | 46,000,000.00 | 40,384,000.00 | 2,848,000.00 | 43,232,000.00 | 93.98 | (2,768,000.00) |
| 4.1.2.07.07 | Retribusi PKB - Mobil Barang/Bahan - Light Truck - LRA | 2,000,000.00 | 19,272,500.00 | 2,063,000.00 | 21,335,500.00 | 1,066.78 | 19,335,500.00 |
| 4.1.2.07.08 | Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA | 41,000,000.00 | 27,653,500.00 | 1,575,000.00 | 29,228,500.00 | 71.29 | (11,771,500.00) |
| 4.1.2.08 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA | 3,500,000.00 | 840,000.00 | 710,000.00 | 1,550,000.00 | 44.29 | (1,950,000.00) |
| 4.1.2.08.01 | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA | 3,500,000.00 | 840,000.00 | 710,000.00 | 1,550,000.00 | 44.29 | (1,950,000.00) |
| 4.1.2.10 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kalkus - LRA | 170,000,000.00 | 116,250,000.00 | 14,250,000.00 | 130,500,000.00 | 76.78 | (39,500,000.00) |
| 4.1.2.10.01 | Penyediaan dan/atau Penyediaan Kalkus - LRA | 170,000,000.00 | 116,250,000.00 | 14,250,000.00 | 130,500,000.00 | 76.78 | (39,500,000.00) |
| 4.1.2.12 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA | 25,000,000.00 | 7,250,000.00 | 37,164,000.00 | 44,414,000.00 | 177.66 | 19,414,000.00 |
| 4.1.2.12.01 | Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya - LRA | 25,000,000.00 | 7,250,000.00 | 37,164,000.00 | 44,414,000.00 | 177.66 | 19,414,000.00 |
| 4.1.2.14 | Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi - LRA | 245,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (245,000,000.00) |
| 4.1.2.14.01 | Pemeriksaan Ruang untuk Manara Telekomunikasi - LRA | 245,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (245,000,000.00) |

Lampiran 1 - Lanjutan

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | PERSENTASE (%) | LESDI / (KURANG) |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | | |
| 4.1.2.15 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA | 2,668,019,000.00 | 1,126,901,089.00 | 106,400,000.00 | 1,233,301,089.00 | 46.23 | (1,434,717,911.00) |
| 4.1.2.15.01 | Pelayanan Tanah dan Bangunan - LRA | 730,429,000.00 | 509,065,089.00 | 35,100,000.00 | 544,225,089.00 | 74.51 | (186,203,911.00) |
| 4.1.2.15.02 | Laboratorium - LRA | 85,000,000.00 | 2,156,000.00 | 0.00 | 2,156,000.00 | 2.54 | (82,844,000.00) |
| 4.1.2.15.03 | Ruangan - LRA | 30,000,000.00 | 21,600,000.00 | 8,550,000.00 | 30,150,000.00 | 100.50 | 150,000.00 |
| 4.1.2.15.04 | Kendaraan Bermotor - LRA | 1,822,990,000.00 | 594,080,000.00 | 62,600,000.00 | 656,770,000.00 | 36.03 | (1,166,220,000.00) |
| 4.1.2.16 | Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan - LRA | 1,394,200,000.00 | 818,004,000.00 | (5,900,000.00) | 812,104,000.00 | 58.25 | (582,100,000.00) |
| 4.1.2.16.01 | Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA | 1,394,200,000.00 | 818,004,000.00 | (5,900,000.00) | 812,104,000.00 | 58.25 | (582,100,000.00) |
| 4.1.2.17 | Retribusi Tempat Pelelangan Ikan - LRA | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (50,000,000.00) |
| 4.1.2.17.01 | Pelelangan Ikan - LRA | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (50,000,000.00) |
| 4.1.2.18 | Retribusi Terminal - LRA | 188,500,000.00 | 106,046,500.00 | 11,780,500.00 | 117,827,000.00 | 74.19 | (70,673,000.00) |
| 4.1.2.18.01 | Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum - LRA | 105,000,000.00 | 62,476,500.00 | 0.00 | 62,476,500.00 | 70.70 | (42,523,500.00) |
| 4.1.2.18.03 | Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA | 83,500,000.00 | 43,570,000.00 | 22,080,000.00 | 65,650,000.00 | 78.59 | (17,850,000.00) |
| 4.1.2.19 | Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA | 99,500,000.00 | 12,302,000.00 | 82,380,000.00 | 94,682,000.00 | 95.16 | (4,818,000.00) |
| 4.1.2.19.01 | Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA | 99,500,000.00 | 12,302,000.00 | 82,380,000.00 | 94,682,000.00 | 95.16 | (4,818,000.00) |
| 4.1.2.21 | Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA | 94,890,000.00 | 52,440,000.00 | 1,030,000.00 | 53,470,000.00 | 56.46 | (41,420,000.00) |
| 4.1.2.21.01 | Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA | 94,890,000.00 | 52,440,000.00 | 1,030,000.00 | 53,470,000.00 | 56.46 | (41,420,000.00) |
| 4.1.2.22 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA | 359,970,084.00 | 88,835,725.00 | 7,869,500.00 | 96,705,225.00 | 26.86 | (263,264,859.00) |
| 4.1.2.22.01 | Pelayanan Jasa Kepelabuhanan - LRA | 359,970,084.00 | 88,835,725.00 | 7,869,500.00 | 96,705,225.00 | 26.86 | (263,264,859.00) |
| 4.1.2.26 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA | 115,380,000.00 | 12,684,375.00 | 67,921,875.00 | 80,606,250.00 | 69.86 | (34,773,750.00) |
| 4.1.2.26.01 | Pembelian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA | 115,380,000.00 | 12,684,375.00 | 67,921,875.00 | 80,606,250.00 | 69.86 | (34,773,750.00) |
| 4.1.2.28 | Retribusi Izin Gangguan - LRA | 151,000,000.00 | 33,098,000.00 | 0.00 | 33,098,000.00 | 21.92 | (117,902,000.00) |
| 4.1.2.28.01 | Pembelian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pihak - LRA | 73,000,000.00 | 12,740,000.00 | 0.00 | 12,740,000.00 | 17.45 | (60,260,000.00) |
| 4.1.2.28.02 | Pembelian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan LRA | 78,000,000.00 | 20,358,000.00 | 0.00 | 20,358,000.00 | 26.10 | (57,642,000.00) |
| 4.1.2.29 | Retribusi Izin Trayek - LRA | 3,000,000.00 | 5,215,000.00 | 50,000.00 | 5,265,000.00 | 175.50 | 2,265,000.00 |
| 4.1.2.29.02 | Pembelian Izin Trayek kepada Badan - LRA | 3,000,000.00 | 5,215,000.00 | 50,000.00 | 5,265,000.00 | 175.50 | 2,265,000.00 |
| 4.1.2.30 | Retribusi Izin Perikanan - LRA | 17,500,000.00 | 8,805,000.00 | 120,000.00 | 8,925,000.00 | 51.00 | (8,575,000.00) |
| 4.1.2.30.02 | Pembelian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LRA | 17,500,000.00 | 8,805,000.00 | 120,000.00 | 8,925,000.00 | 51.00 | (8,575,000.00) |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 4,816,063,499.00 | 4,730,000,265.56 | 0.00 | 4,730,000,265.56 | 98.21 | (86,063,233.44) |
| 4.1.3.01 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BLUD - LRA | 4,816,063,499.00 | 4,730,000,265.56 | 0.00 | 4,730,000,265.56 | 98.21 | (86,063,233.44) |
| 4.1.3.01.02 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA | 4,816,063,499.00 | 4,730,000,265.56 | 0.00 | 4,730,000,265.56 | 98.21 | (86,063,233.44) |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | PERSENTASE (%) | LESDI / (KURANG) |
|----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | | |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah - LRA | 144,146,940,407.00 | 81,763,598,384.18 | 39,699,052,025.14 | 121,462,650,409.32 | 85.65 | (20,684,289,997.68) |
| 4.1.4.03 | Penerimaan Jasa Giro - LRA | 1,300,000,000.00 | 684,309,085.94 | 22,526,075.17 | 706,835,161.11 | 53.90 | (493,164,838.89) |
| 4.1.4.03.01 | Jasa Giro Kas Daerah - LRA | 1,300,000,000.00 | 684,309,085.94 | 22,526,075.17 | 706,835,161.11 | 53.90 | (493,164,838.89) |
| 4.1.4.04 | Penerimaan Bunga Deposito - LRA | 6,808,310,557.00 | 4,334,051,046.75 | 508,334,239.47 | 4,842,385,286.22 | 71.86 | (1,965,925,270.78) |
| 4.1.4.04.01 | Rekening Deposito Pada Bank - LRA | 6,808,310,557.00 | 4,334,051,046.75 | 508,334,239.47 | 4,842,385,286.22 | 71.86 | (1,965,925,270.78) |
| 4.1.4.05 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA | 1,100,000,000.00 | 546,544,569.82 | 63,610,000.00 | 610,154,569.82 | 55.47 | (489,845,430.18) |
| 4.1.4.05.01 | Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap/Bendaharawan - LRA | 1,100,000,000.00 | 546,544,569.82 | 63,610,000.00 | 610,154,569.82 | 55.47 | (489,845,430.18) |
| 4.1.4.05.01.01 | - LHP | 0.00 | 86,963,703.20 | 60,615,000.00 | 147,578,703.20 | 0.00 | 147,578,703.20 |
| 4.1.4.05.01.02 | - NHP | 0.00 | 459,580,866.62 | 2,995,000.00 | 462,575,866.62 | 0.00 | (462,575,866.62) |
| 4.1.4.07 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA | 200,000,000.00 | 151,566,095.10 | 12,734,919.80 | 164,301,014.90 | 82.15 | (35,698,985.10) |
| 4.1.4.07.03 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA | 200,000,000.00 | 151,566,095.10 | 12,734,919.80 | 164,301,014.90 | 82.15 | (35,698,985.10) |
| 4.1.4.09 | Pendapatan Denda Retribusi - LRA | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 4.1.4.09.15 | Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 4.1.4.11 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda - LRA | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (15,000,000.00) |
| 4.1.4.11.01 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda - LRA | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (15,000,000.00) |
| 4.1.4.12.01 | Pendapatan Hasil Ekshibisi atas JamINAN - LRA | 0.00 | 156,263,344.00 | 0.00 | 156,263,344.00 | 0.00 | 156,263,344.00 |
| 4.1.4.12.01.01 | Hasil Ekshibisi Atas JamINAN atas Pengada Barang/Jasa - LRA | 0.00 | 156,263,344.00 | 0.00 | 156,263,344.00 | 0.00 | 156,263,344.00 |
| 4.1.4.13 | Pendapatan Dari Pengembalian | 1,154,476,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,154,476,078.00) |
| 4.1.4.13.06 | Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) - LRA | 1,154,476,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,154,476,078.00) |
| 4.1.4.15 | Pendapatan Dari Anggaran/Cicilan Perjudian - LRA | 344,916,400.00 | 184,244,649.50 | 4,853,267.50 | 189,098,917.00 | 54.82 | (155,817,482.50) |
| 4.1.4.15.01 | Anggaran/Cicilan Perjudian Rumah Dinas - LRA | 0.00 | 55,543,049.50 | 4,853,267.50 | 60,396,317.00 | 0.00 | 60,396,317.00 |
| 4.1.4.15.02 | Anggaran/Cicilan Perjudian Kendaraan Perangin Dinas - LRA | 344,916,400.00 | 128,701,600.00 | 0.00 | 128,701,600.00 | 37.31 | (216,214,800.00) |
| 4.1.4.16 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA | 105,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (105,000,000.00) |
| 4.1.4.16.01 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA | 105,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (105,000,000.00) |
| 4.1.4.17 | Pendapatan Zakat - LRA | 13,150,000,000.00 | 10,727,960,751.07 | 2,224,721,187.70 | 12,952,681,938.77 | 98.50 | (157,318,061.23) |
| 4.1.4.17.01 | Pendapatan Zakat - LRA | 13,150,000,000.00 | 10,727,960,751.07 | 2,224,721,187.70 | 12,952,681,938.77 | 98.50 | (157,318,061.23) |
| 4.1.4.18 | Pendapatan BLUD - LRA | 87,989,967,744.00 | 56,613,755,102.00 | 14,101,596,960.00 | 70,715,352,062.00 | 80.82 | (16,777,615,682.00) |
| 4.1.4.18.01 | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA | 87,989,967,744.00 | 56,613,755,102.00 | 14,101,596,960.00 | 70,715,352,062.00 | 80.82 | (16,777,615,682.00) |
| 4.1.4.18.04 | Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA | 461,000,000.00 | 357,984,709.00 | 118,478,616.00 | 476,463,325.00 | 103.35 | 154,474,291.50 |
| 4.1.4.19 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA | 0.00 | 309,280,915.00 | 5,193,376.50 | 314,474,291.50 | 0.00 | 314,474,291.50 |
| 4.1.4.19.01 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA | 0.00 | 309,280,915.00 | 5,193,376.50 | 314,474,291.50 | 0.00 | 314,474,291.50 |

Lampiran 2: Data Penelitian Tahun 2018

DATA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4 | PENDAPATAN - LRA | 1.272.036.731.259,90 | 0,00 | 1.250.681.695.136,38 | 1.250.681.695.136,38 | (21.355.036.123,52) |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 165.425.983.311,00 | 0,00 | 150.499.049.235,64 | 150.499.049.235,64 | (14.926.934.075,36) |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 16.170.500.000,00 | 0,00 | 16.523.321.144,85 | 16.523.321.144,85 | 352.821.144,85 |
| 4.1.1.06 | Pajak Hotel - LRA | 181.000.000,00 | 0,00 | 185.717.000,00 | 185.717.000,00 | 4.717.000,00 |
| 4.1.1.06.01 | Hotel - LRA | 145.000.000,00 | 0,00 | 152.617.000,00 | 152.617.000,00 | 7.617.000,00 |
| 4.1.1.06.03 | Losmen - LRA | 36.000.000,00 | 0,00 | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 | (2.900.000,00) |
| 4.1.1.07 | Pajak Restoran - LRA | 2.305.000.000,00 | 0,00 | 2.485.656.707,40 | 2.485.656.707,40 | 180.656.707,40 |
| 4.1.1.07.01 | Restoran - LRA | 965.000.000,00 | 0,00 | 593.373.383,00 | 593.373.383,00 | (371.626.617,00) |
| 4.1.1.07.02 | Rumah Makan - LRA | 49.500.000,00 | 0,00 | 86.315.720,00 | 86.315.720,00 | 36.815.720,00 |
| 4.1.1.07.03 | Kafetaria - LRA | 49.500.000,00 | 0,00 | 82.035.000,00 | 82.035.000,00 | (32.465.000,00) |
| 4.1.1.07.05 | Warung - LRA | 1.641.000.000,00 | 0,00 | 1.723.932.604,40 | 1.723.932.604,40 | 82.932.604,40 |
| 4.1.1.08 | Pajak Hiburan - LRA | 50.000.000,00 | 0,00 | 62.654.876,00 | 62.654.876,00 | 12.654.876,00 |
| 4.1.1.08.02 | Pagarlaran Kesenian/Musi/Tari/Busana - LRA | 28.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (28.900.000,00) |
| 4.1.1.08.06 | Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000.000,00) |
| 4.1.1.08.09 | Bandi Pijat, Refleksi, Handi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.600.000,00) |
| 4.1.1.08.10 | Pertandingan Olahraga - LRA | 14.500.000,00 | 0,00 | 62.654.876,00 | 62.654.876,00 | 48.154.876,00 |
| 4.1.1.09 | Pajak Reklame - LRA | 314.000.000,00 | 0,00 | 367.779.874,67 | 367.779.874,67 | 53.779.874,67 |
| 4.1.1.09.01 | Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron - LRA | 221.000.000,00 | 0,00 | 314.971.199,67 | 314.971.199,67 | 93.971.199,67 |
| 4.1.1.09.02 | Reklame Kain - LRA | 91.000.000,00 | 0,00 | 41.194.375,00 | 41.194.375,00 | (49.805.625,00) |
| 4.1.1.09.03 | Reklame Helekat/Stiker - LRA | 2.000.000,00 | 0,00 | 11.614.300,00 | 11.614.300,00 | 9.614.300,00 |
| 4.1.1.10 | Pajak Penerangan Jalan - LRA | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 9.181.505.343,00 | 9.181.505.343,00 | 2.181.505.343,00 |
| 4.1.1.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 9.181.505.343,00 | 9.181.505.343,00 | 2.181.505.343,00 |
| 4.1.1.11 | Pajak Parkir - LRA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) |
| 4.1.1.11.01 | Pajak Parkir - LRA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) |
| 4.1.1.12 | Pajak Air Tanah - LRA | 20.000.000,00 | 0,00 | 18.281.150,00 | 18.281.150,00 | (1.718.850,00) |
| 4.1.1.12.01 | Pajak Air Tanah - LRA | 20.000.000,00 | 0,00 | 18.281.150,00 | 18.281.150,00 | (1.718.850,00) |
| 4.1.1.13 | Pajak Sarang Burung Walet - LRA | 34.000.000,00 | 0,00 | 34.550.000,00 | 34.550.000,00 | 550.000,00 |
| 4.1.1.13.01 | Pajak Sarang Burung Walet - LRA | 34.000.000,00 | 0,00 | 34.550.000,00 | 34.550.000,00 | 550.000,00 |
| 4.1.1.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA | 2.100.000.000,00 | 0,00 | 2.022.102.509,00 | 2.022.102.509,00 | (77.897.491,00) |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 19

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4.1.1.14.08 | Tanah Timbun - LRA | 250.000.000,00 | 0,00 | 198.114.618,00 | 198.114.618,00 | (51.885.382,00) |
| 4.1.1.14.09 | Pasar - LRA | 350.000.000,00 | 0,00 | 347.608.230,00 | 347.608.230,00 | (2.391.770,00) |
| 4.1.1.14.23 | Pasar dan Kerukil - LRA | 395.000.000,00 | 0,00 | 362.314.050,00 | 362.314.050,00 | (32.685.950,00) |
| 4.1.1.14.38 | Pasar Urug - LRA | 80.000.000,00 | 0,00 | 34.768.890,00 | 34.768.890,00 | (45.231.110,00) |
| 4.1.1.14.39 | Kerukil - LRA | 675.000.000,00 | 0,00 | 659.211.958,00 | 659.211.958,00 | (15.788.042,00) |
| 4.1.1.14.40 | Korod/Batu Kali - LRA | 350.000.000,00 | 0,00 | 220.084.763,00 | 220.084.763,00 | (129.915.237,00) |
| 4.1.1.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA | 2.665.500.000,00 | 0,00 | 1.224.843.783,78 | 1.224.843.783,78 | (1.440.656.216,22) |
| 4.1.1.15.01 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA | 2.665.500.000,00 | 0,00 | 1.224.843.783,78 | 1.224.843.783,78 | (1.440.656.216,22) |
| 4.1.1.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 940.229.901,00 | 940.229.901,00 | (559.770.099,00) |
| 4.1.1.16.01 | BPHTB | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 940.229.901,00 | 940.229.901,00 | (559.770.099,00) |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 9.503.673.500,00 | 0,00 | 7.107.080.592,00 | 7.107.080.592,00 | (2.396.592.908,00) |
| 4.1.2.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA | 2.672.200.000,00 | 0,00 | 2.483.906.500,00 | 2.483.906.500,00 | (188.293.500,00) |
| 4.1.2.01.01 | Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA | 2.632.200.000,00 | 0,00 | 2.466.717.500,00 | 2.466.717.500,00 | (165.482.500,00) |
| 4.1.2.01.06 | Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA | 40.000.000,00 | 0,00 | 17.189.000,00 | 17.189.000,00 | (22.811.000,00) |
| 4.1.2.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA | 646.237.500,00 | 0,00 | 600.810.000,00 | 600.810.000,00 | (45.427.500,00) |
| 4.1.2.02.01 | Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA | 646.237.500,00 | 0,00 | 600.810.000,00 | 600.810.000,00 | (45.427.500,00) |
| 4.1.2.05 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA | 143.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | (53.000.000,00) |
| 4.1.2.05.01 | Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA | 143.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | (53.000.000,00) |
| 4.1.2.06 | Retribusi Pelayanan Pasar - LRA | 416.450.000,00 | 0,00 | 110.738.000,00 | 110.738.000,00 | (305.712.000,00) |
| 4.1.2.06.02 | Retribusi Pelayanan Pasar - LRA | 416.450.000,00 | 0,00 | 110.738.000,00 | 110.738.000,00 | (305.712.000,00) |
| 4.1.2.06.03 | Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA | 300.000.000,00 | 0,00 | 109.238.000,00 | 109.238.000,00 | (190.762.000,00) |
| 4.1.2.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA | 114.862.000,00 | 0,00 | 114.725.000,00 | 114.725.000,00 | (137.000,00) |
| 4.1.2.07.03 | Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA | 450.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | (395.000,00) |
| 4.1.2.07.04 | Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA | 10.772.000,00 | 0,00 | 11.876.000,00 | 11.876.000,00 | 1.104.000,00 |
| 4.1.2.07.05 | Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA | 200.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 265.000,00 |
| 4.1.2.07.06 | Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up - LRA | 47.340.000,00 | 0,00 | 44.529.000,00 | 44.529.000,00 | (2.811.000,00) |
| 4.1.2.07.07 | Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck - LRA | 40.000.000,00 | 0,00 | 37.710.000,00 | 37.710.000,00 | (2.290.000,00) |
| 4.1.2.07.08 | Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Truck - LRA | 16.500.000,00 | 0,00 | 20.088.000,00 | 20.088.000,00 | 3.588.000,00 |
| 4.1.2.08 | Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA | 3.500.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | (2.880.000,00) |
| 4.1.2.08.01 | Pelayanan Pemeliharaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA | 3.500.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | (2.880.000,00) |
| 4.1.2.10 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kaku - LRA | 194.150.000,00 | 0,00 | 162.300.000,00 | 162.300.000,00 | (31.850.000,00) |
| 4.1.2.10.01 | Penyediaan dan/atau Pemeliharaan Kaku - LRA | 194.150.000,00 | 0,00 | 162.300.000,00 | 162.300.000,00 | (31.850.000,00) |
| 4.1.2.12 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA | 50.000.000,00 | 0,00 | 77.583.600,00 | 77.583.600,00 | 27.583.600,00 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 19

Lampiran 2 – Lanjutan

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4.2.2.03 | Dana Penyesuaian - LRA | 256.177.995.000,00 | 0,00 | 255.442.020.000,00 | 255.442.020.000,00 | (735.575.000,00) |
| 4.2.2.03.03 | Dana Insentif Daerah - LRA | 35.250.000.000,00 | 0,00 | 35.250.000.000,00 | 35.250.000.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2.03.06 | Pendapatan Transfer Dana Desa dari APBN - LRA | 220.927.995.000,00 | 0,00 | 220.192.020.000,00 | 220.192.020.000,00 | (735.575.000,00) |
| 4.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 41.394.588.187,00 | 0,00 | 28.572.750.956,74 | 28.572.750.956,74 | (12.821.837.230,26) |
| 4.2.3.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 41.394.588.187,00 | 0,00 | 28.572.750.956,74 | 28.572.750.956,74 | (12.821.837.230,26) |
| 4.2.3.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 41.394.588.187,00 | 0,00 | 28.572.750.956,74 | 28.572.750.956,74 | (12.821.837.230,26) |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 26.978.456.761,90 | 0,00 | 34.299.338.705,00 | 34.299.338.705,00 | 7.320.881.943,10 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah - LRA | 26.978.456.761,90 | 0,00 | 34.299.338.705,00 | 34.299.338.705,00 | 7.320.881.943,10 |
| 4.3.1.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA | 19.738.200.000,00 | 0,00 | 19.562.040.000,00 | 19.562.040.000,00 | (176.160.000,00) |
| 4.3.1.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 19.738.200.000,00 | 0,00 | 19.562.040.000,00 | 19.562.040.000,00 | (176.160.000,00) |
| 4.3.1.03 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA | 7.240.256.761,90 | 0,00 | 14.737.298.705,00 | 14.737.298.705,00 | 7.497.041.943,10 |
| 4.3.1.03.01 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri - LRA | 7.240.256.761,90 | 0,00 | 14.737.298.705,00 | 14.737.298.705,00 | 7.497.041.943,10 |
| 5 | BELANJA | 1.039.708.958.846,78 | 0,00 | 931.754.345.242,00 | 931.754.345.242,00 | (107.954.613.604,78) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 818.536.186.244,07 | 0,00 | 739.329.436.838,00 | 739.329.436.838,00 | (79.206.749.406,07) |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 464.084.184.012,78 | 0,00 | 426.961.207.651,00 | 426.961.207.651,00 | (37.122.976.361,78) |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 388.948.833.669,93 | 0,00 | 363.339.926.509,00 | 363.339.926.509,00 | (25.608.907.160,93) |
| 5.1.1.01.01 | Belanja Gaji Pokok PNS/Usang Representasi | 245.020.234.556,72 | 0,00 | 233.917.790.277,00 | 233.917.790.277,00 | (11.102.442.279,72) |
| 5.1.1.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga | 23.227.801.005,33 | 0,00 | 21.104.248.493,00 | 21.104.248.493,00 | (2.123.552.512,33) |
| 5.1.1.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan | 7.640.369.054,00 | 0,00 | 7.399.182.354,00 | 7.399.182.354,00 | (241.186.700,00) |
| 5.1.1.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional | 14.979.722.825,00 | 0,00 | 14.562.235.000,00 | 14.562.235.000,00 | (417.487.825,00) |
| 5.1.1.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum | 4.728.728.175,00 | 0,00 | 4.559.751.300,00 | 4.559.751.300,00 | (168.976.875,00) |
| 5.1.1.01.06 | Belanja Tunjangan Basis | 12.746.595.257,58 | 0,00 | 12.373.825.589,00 | 12.373.825.589,00 | (372.769.668,58) |
| 5.1.1.01.07 | Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus | 562.891.667,67 | 0,00 | 541.724.828,00 | 541.724.828,00 | (20.966.739,67) |
| 5.1.1.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji | 3.424.099,90 | 0,00 | 3.320.508,00 | 3.320.508,00 | (103.591,90) |
| 5.1.1.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan | 6.779.726.059,53 | 0,00 | 6.608.321.280,00 | 6.608.321.280,00 | (171.404.779,53) |
| 5.1.1.01.10 | Belanja Uang Paket | 58.996.796,00 | 0,00 | 48.132.000,00 | 48.132.000,00 | (10.864.796,00) |
| 5.1.1.01.11 | Belanja Tunjangan Badan Musyawarah | 21.274.368,00 | 0,00 | 18.818.100,00 | 18.818.100,00 | (2.456.268,00) |
| 5.1.1.01.12 | Belanja Tunjangan Komisi | 42.996.618,00 | 0,00 | 35.078.400,00 | 35.078.400,00 | (7.918.218,00) |
| 5.1.1.01.13 | Belanja Tunjangan Badan Anggaran | 21.274.368,00 | 0,00 | 18.818.100,00 | 18.818.100,00 | (2.456.268,00) |
| 5.1.1.01.14 | Belanja Tunjangan Badan Kehormatan | 6.942.162,00 | 0,00 | 5.663.700,00 | 5.663.700,00 | (1.278.462,00) |
| 5.1.1.01.15 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 10.973.095,00 | 0,00 | 10.413.900,00 | 10.413.900,00 | (559.195,00) |
| 5.1.1.01.16 | Belanja Tunjangan Perumahan | 2.920.800.000,00 | 0,00 | 2.920.800.000,00 | 2.920.800.000,00 | 0,00 |
| 5.1.1.01.19 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | 352.800.000,00 | 0,00 | 110.880.000,00 | 110.880.000,00 | (241.920.000,00) |
| 5.1.1.01.21 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | 563.009.333,99 | 0,00 | 483.395.659,00 | 483.395.659,00 | (79.613.674,99) |
| 5.1.1.01.22 | Belanja Iuran Jaminan Kematian | 1.341.714.809,31 | 0,00 | 1.438.604.803,00 | 1.438.604.803,00 | 96.889.993,69 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 6 dari 19

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 8.225.030.000,00 | 0,00 | 7.831.425.000,00 | 7.831.425.000,00 | (393.605.000,00) |
| 5.1.5.05 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 5.176.430.000,00 | 0,00 | 4.782.825.000,00 | 4.782.825.000,00 | (393.605.000,00) |
| 5.1.5.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 5.176.430.000,00 | 0,00 | 4.782.825.000,00 | 4.782.825.000,00 | (393.605.000,00) |
| 5.1.5.08 | BOP PAUD Masyarakat/Swasta | 3.048.600.000,00 | 0,00 | 3.048.600.000,00 | 3.048.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.5.08.01 | BOP PAUD Masyarakat/Swasta | 3.048.600.000,00 | 0,00 | 3.048.600.000,00 | 3.048.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 6.073.000.000,00 | 0,00 | 4.137.111.000,00 | 4.137.111.000,00 | (1.935.889.000,00) |
| 5.1.6.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 920.000.000,00 | 920.000.000,00 | (80.000.000,00) |
| 5.1.6.01.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 920.000.000,00 | 920.000.000,00 | (80.000.000,00) |
| 5.1.6.02 | Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat | 5.073.000.000,00 | 0,00 | 3.217.111.000,00 | 3.217.111.000,00 | (1.855.889.000,00) |
| 5.1.6.02.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada | 5.073.000.000,00 | 0,00 | 3.217.111.000,00 | 3.217.111.000,00 | (1.855.889.000,00) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 206.924.209.332,00 | 0,00 | 192.424.908.404,00 | 192.424.908.404,00 | (14.499.290.928,00) |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 4.931.517.905,00 | 0,00 | 4.485.505.564,00 | 4.485.505.564,00 | (446.012.341,00) |
| 5.2.1.08 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak | 16.000.000,00 | 0,00 | 15.891.000,00 | 15.891.000,00 | (109.000,00) |
| 5.2.1.08.01 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus | 16.000.000,00 | 0,00 | 15.891.000,00 | 15.891.000,00 | (109.000,00) |
| 5.2.1.11 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 4.908.507.130,00 | 0,00 | 4.462.614.564,00 | 4.462.614.564,00 | (445.892.566,00) |
| 5.2.1.11.01 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/C. Tempat Tinggal | 42.800.000,00 | 0,00 | 39.787.000,00 | 39.787.000,00 | (3.013.000,00) |
| 5.2.1.11.02 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Pengadangan/Perumahan | 2.055.707.130,00 | 0,00 | 1.958.625.233,00 | 1.958.625.233,00 | (97.081.897,00) |
| 5.2.1.11.04 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa | 2.810.000.000,00 | 0,00 | 2.464.202.331,00 | 2.464.202.331,00 | (345.797.669,00) |
| 5.2.1.13 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 7.010.775,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | (10.775,00) |
| 5.2.1.13.02 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir | 7.010.775,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | (10.775,00) |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 45.277.976.424,00 | 0,00 | 39.806.947.094,00 | 39.806.947.094,00 | (5.471.029.330,00) |
| 5.2.2.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu | 1.335.500.000,00 | 0,00 | 1.297.324.000,00 | 1.297.324.000,00 | (38.176.000,00) |
| 5.2.2.03.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set | 1.334.000.000,00 | 0,00 | 1.295.824.000,00 | 1.295.824.000,00 | (38.176.000,00) |
| 5.2.2.03.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 5.521.192.000,00 | 0,00 | 5.284.940.240,00 | 5.284.940.240,00 | (236.251.760,00) |
| 5.2.2.04.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penunjang | 635.142.000,00 | 0,00 | 634.850.000,00 | 634.850.000,00 | (292.000,00) |
| 5.2.2.04.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus | 3.960.000.000,00 | 0,00 | 3.724.040.240,00 | 3.724.040.240,00 | (235.959.760,00) |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 11 dari 19

Lampiran 3: Data Penelitian Tahun 2019

DATA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4 | PENDAPATAN - LRA | 1.425.410.708,131,00 | 0,00 | 1.399.139.190,532,32 | 1.399.139.190,532,32 | (26.271.517,598,68) |
| 4.1 | PENDAPATAN ALI DAERAH (PAD) - LRA | 166.876.962,225,00 | 0,00 | 153.799.291,478,27 | 153.799.291,478,27 | (13.077.670,746,73) |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 17.299.885,161,00 | 0,00 | 20.401.524,693,10 | 20.401.524,693,10 | 3.101.639,532,10 |
| 4.1.1.06 | Pajak Hotel - LRA | 183.000.000,00 | 0,00 | 251.711.000,00 | 251.711.000,00 | 68.711.000,00 |
| 4.1.1.06.01 | Hotel - LRA | 150.000.000,00 | 0,00 | 212.215.000,00 | 212.215.000,00 | 62.215.000,00 |
| 4.1.1.06.03 | Losmen - LRA | 33.000.000,00 | 0,00 | 39.496.000,00 | 39.496.000,00 | 6.496.000,00 |
| 4.1.1.07 | Pajak Restoran - LRA | 2.386.000.000,00 | 0,00 | 3.073.895,345,60 | 3.073.895,345,60 | 687.895,345,60 |
| 4.1.1.07.01 | Restoran - LRA | 580.000.000,00 | 0,00 | 805.491,228,40 | 805.491,228,40 | 225.491,228,40 |
| 4.1.1.07.02 | Rumah Makan - LRA | 60.000.000,00 | 0,00 | 78.120.500,00 | 78.120.500,00 | 18.120.500,00 |
| 4.1.1.07.03 | Kafetaria - LRA | 55.000.000,00 | 0,00 | 69.510.000,00 | 69.510.000,00 | 14.510.000,00 |
| 4.1.1.07.05 | Warung - LRA | 1.691.000.000,00 | 0,00 | 2.120.773,617,20 | 2.120.773,617,20 | 429.773,617,20 |
| 4.1.1.08 | Pajak Hiburan - LRA | 60.500.000,00 | 0,00 | 117.779,604,00 | 117.779,604,00 | 57.279,604,00 |
| 4.1.1.08.02 | Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (31.000.000,00) |
| 4.1.1.08.08 | Pacuan Kuda, Kendaran Bermotor, Permainan Kestangkasan - LRA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.500.000,00) |
| 4.1.1.08.09 | Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) |
| 4.1.1.08.10 | Perandingan Olahraga - LRA | 27.000.000,00 | 0,00 | 117.779,604,00 | 117.779,604,00 | 90.779,604,00 |
| 4.1.1.09 | Pajak Reklame - LRA | 340.000.000,00 | 0,00 | 406.026,527,50 | 406.026,527,50 | 66.026,527,50 |
| 4.1.1.09.01 | Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron - LRA | 280.000.000,00 | 0,00 | 363.872,027,50 | 363.872,027,50 | 83.872,027,50 |
| 4.1.1.09.02 | Reklame Kain - LRA | 50.000.000,00 | 0,00 | 42.154.500,00 | 42.154.500,00 | (7.845.500,00) |
| 4.1.1.09.03 | Reklame Melekat/Siker - LRA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (10.000.000,00) |
| 4.1.1.10 | Pajak Penerangan Jalan - LRA | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 10.107,653,116,00 | 10.107,653,116,00 | 2.107,653,116,00 |
| 4.1.1.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 10.107,653,116,00 | 10.107,653,116,00 | 2.107,653,116,00 |
| 4.1.1.11 | Pajak Parkir - LRA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.11.01 | Pajak Parkir - LRA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.12 | Pajak Air Tanah - LRA | 30.000.000,00 | 0,00 | 44.621,640,00 | 44.621,640,00 | 14.621,640,00 |
| 4.1.1.12.01 | Pajak Air Tanah - LRA | 30.000.000,00 | 0,00 | 44.621,640,00 | 44.621,640,00 | 14.621,640,00 |
| 4.1.1.13 | Pajak Sarang Burung Walet - LRA | 34.000.000,00 | 0,00 | 34.550.000,00 | 34.550.000,00 | 550.000,00 |
| 4.1.1.13.01 | Pajak Sarang Burung Walet - LRA | 34.000.000,00 | 0,00 | 34.550.000,00 | 34.550.000,00 | 550.000,00 |
| 4.1.1.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA | 2.100.000.000,00 | 0,00 | 3.371,557,430,00 | 3.371,557,430,00 | 1.271,557,430,00 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 20

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4.1.1.14.08 | Tanah Timbun - LRA | 250.000.000,00 | 0,00 | 1.811.330,725,00 | 1.811.330,725,00 | 1.561.330,725,00 |
| 4.1.1.14.09 | Pasir - LRA | 350.000.000,00 | 0,00 | 220.512,355,00 | 220.512,355,00 | (129.487,645,00) |
| 4.1.1.14.23 | Pasir dan Kerikil - LRA | 395.000.000,00 | 0,00 | 576.236,750,00 | 576.236,750,00 | 181.236,750,00 |
| 4.1.1.14.38 | Pasir Urug - LRA | 80.000.000,00 | 0,00 | 25.870,180,00 | 25.870,180,00 | (54.129,820,00) |
| 4.1.1.14.39 | Kerikil - LRA | 675.000.000,00 | 0,00 | 538.954,695,00 | 538.954,695,00 | (136.045,305,00) |
| 4.1.1.14.40 | Koral/Batu Kalk - LRA | 650.000.000,00 | 0,00 | 198.652,725,00 | 198.652,725,00 | (451.347,275,00) |
| 4.1.1.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA | 2.645.885,161,00 | 0,00 | 1.293.039,971,00 | 1.293.039,971,00 | (1.352.845,190,00) |
| 4.1.1.15.01 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA | 2.645.885,161,00 | 0,00 | 1.293.039,971,00 | 1.293.039,971,00 | (1.352.845,190,00) |
| 4.1.1.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA | 1.520.000.000,00 | 0,00 | 1.700.190,059,00 | 1.700.190,059,00 | 180.190,059,00 |
| 4.1.1.16.01 | BPHTB | 1.520.000.000,00 | 0,00 | 1.700.190,059,00 | 1.700.190,059,00 | 180.190,059,00 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 9.451.106,360,00 | 0,00 | 7.340.707,177,00 | 7.340.707,177,00 | (2.110.399,183,00) |
| 4.1.2.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA | 2.930.000.000,00 | 0,00 | 2.710.706,400,00 | 2.710.706,400,00 | (219.293,600,00) |
| 4.1.2.01.01 | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LRA | 2.890.000.000,00 | 0,00 | 2.676.139,400,00 | 2.676.139,400,00 | (213.860,600,00) |
| 4.1.2.01.06 | Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA | 40.000.000,00 | 0,00 | 34.567,000,00 | 34.567,000,00 | (5.433,000,00) |
| 4.1.2.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA | 831.147,500,00 | 0,00 | 542.260,000,00 | 542.260,000,00 | (288.887,500,00) |
| 4.1.2.02.01 | Pengangkutan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA | 831.147,500,00 | 0,00 | 542.260,000,00 | 542.260,000,00 | (288.887,500,00) |
| 4.1.2.05 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA | 150.000.000,00 | 0,00 | 137.000.000,00 | 137.000.000,00 | (13.000.000,00) |
| 4.1.2.05.01 | Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA | 150.000.000,00 | 0,00 | 137.000.000,00 | 137.000.000,00 | (13.000.000,00) |
| 4.1.2.06 | Retribusi Pelayanan Pasar - LRA | 417.850.000,00 | 0,00 | 208.940.000,00 | 208.940.000,00 | (208.910.000,00) |
| 4.1.2.06.02 | Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA | 131.450.000,00 | 0,00 | 32.206.000,00 | 32.206.000,00 | (99.244,000,00) |
| 4.1.2.06.03 | Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA | 285.400.000,00 | 0,00 | 176.734.000,00 | 176.734.000,00 | (108.666,000,00) |
| 4.1.2.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA | 119.677.000,00 | 0,00 | 109.469.000,00 | 109.469.000,00 | (10.208,000,00) |
| 4.1.2.07.03 | Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA | 235.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | (95.000,00) |
| 4.1.2.07.04 | Retribusi PKB - Mobil Bus - Minibus - LRA | 11.500.000,00 | 0,00 | 10.767.000,00 | 10.767.000,00 | (733.000,00) |
| 4.1.2.07.05 | Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA | 520.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | (20.000,00) |
| 4.1.2.07.06 | Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up - LRA | 47.262.000,00 | 0,00 | 44.135.000,00 | 44.135.000,00 | (3.127,000,00) |
| 4.1.2.07.07 | Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck - LRA | 40.940.000,00 | 0,00 | 32.862.000,00 | 32.862.000,00 | (7.078,000,00) |
| 4.1.2.07.08 | Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Truck - LRA | 20.100.000,00 | 0,00 | 21.035.000,00 | 21.035.000,00 | 935,000,00 |
| 4.1.2.08 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA | 3.500.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | (3.350,000,00) |
| 4.1.2.08.01 | Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA | 3.500.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | (3.350,000,00) |
| 4.1.2.10 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku - LRA | 194.150.000,00 | 0,00 | 194.925.000,00 | 194.925.000,00 | 775.000,00 |
| 4.1.2.10.01 | Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku - LRA | 194.150.000,00 | 0,00 | 194.925.000,00 | 194.925.000,00 | 775.000,00 |
| 4.1.2.12 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA | 51.000.000,00 | 0,00 | 77.395,400,00 | 77.395,400,00 | 26.395,400,00 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 20

Lampiran 3– Lanjutan

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4.2.1.05.11 | Tunjangan Khusus Guru - LRA | 15.516.014.000,00 | 0,00 | 8.921.879.640,00 | 8.921.879.640,00 | (6.594.134.360,00) |
| 4.2.1.05.13 | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA | 1.163.597.000,00 | 0,00 | 1.263.127.060,00 | 1.263.127.060,00 | 99.530.060,00 |
| 4.2.1.05.14 | Akreditasi Labkesda - LRA | 326.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (326.350.000,00) |
| 4.2.1.05.15 | Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesteraan - LRA | 1.283.700.000,00 | 0,00 | 1.283.700.000,00 | 1.283.700.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 367.760.438.936,00 | 0,00 | 367.110.232.936,00 | 367.110.232.936,00 | (650.206.000,00) |
| 4.2.2.01 | Dana Otonomi Khusus - LRA | 106.185.848.936,00 | 0,00 | 106.185.848.936,00 | 106.185.848.936,00 | 0,00 |
| 4.2.2.01.01 | Dana Otonomi Khusus - LRA | 106.185.848.936,00 | 0,00 | 106.185.848.936,00 | 106.185.848.936,00 | 0,00 |
| 4.2.2.03 | Dana Pemeliharaan - LRA | 261.574.590.000,00 | 0,00 | 260.924.384.000,00 | 260.924.384.000,00 | (650.206.000,00) |
| 4.2.2.03.03 | Dana Insentif Daerah - LRA | 12.092.064.000,00 | 0,00 | 12.092.064.000,00 | 12.092.064.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2.03.06 | Pendapatan Transfer Dana Desa dari APBN - LRA | 249.482.526.000,00 | 0,00 | 248.832.320.000,00 | 248.832.320.000,00 | (650.206.000,00) |
| 4.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 29.578.572.038,00 | 0,00 | 31.370.849.769,05 | 31.370.849.769,05 | 1.792.277.731,05 |
| 4.2.3.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 29.578.572.038,00 | 0,00 | 31.370.849.769,05 | 31.370.849.769,05 | 1.792.277.731,05 |
| 4.2.3.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 29.578.572.038,00 | 0,00 | 31.370.849.769,05 | 31.370.849.769,05 | 1.792.277.731,05 |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan - LRA | 111.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (111.800.000,00) |
| 4.2.4.01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | 111.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (111.800.000,00) |
| 4.2.4.01.01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Aceh - LRA | 111.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (111.800.000,00) |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 30.450.400.000,00 | 0,00 | 32.351.308.446,00 | 32.351.308.446,00 | 1.900.908.446,00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah - LRA | 30.450.400.000,00 | 0,00 | 32.351.308.446,00 | 32.351.308.446,00 | 1.900.908.446,00 |
| 4.3.1.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA | 23.950.400.000,00 | 0,00 | 23.950.400.000,00 | 23.950.400.000,00 | 0,00 |
| 4.3.1.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 23.950.400.000,00 | 0,00 | 23.950.400.000,00 | 23.950.400.000,00 | 0,00 |
| 4.3.1.03 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA | 6.500.000.000,00 | 0,00 | 8.400.908.446,00 | 8.400.908.446,00 | 1.900.908.446,00 |
| 4.3.1.03.01 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA | 6.500.000.000,00 | 0,00 | 8.400.908.446,00 | 8.400.908.446,00 | 1.900.908.446,00 |
| 5 | BELANJA | 1.193.075.439.237,26 | 0,00 | 1.052.106.351.389,69 | 1.052.106.351.389,69 | (140.969.087.847,57) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 874.689.669.756,26 | 0,00 | 788.592.427.328,69 | 788.592.427.328,69 | (86.097.242.427,57) |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 491.297.279.301,68 | 0,00 | 445.029.178.634,00 | 445.029.178.634,00 | (46.268.100.667,68) |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 415.463.448.538,68 | 0,00 | 379.884.747.816,00 | 379.884.747.816,00 | (35.578.701.722,68) |
| 5.1.1.01.01 | Belanja Gaji Pokok PMS/ Uang Representasi | 256.032.175.337,68 | 0,00 | 245.520.636.927,00 | 245.520.636.927,00 | (10.511.538.410,68) |
| 5.1.1.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga | 26.399.594.601,00 | 0,00 | 21.871.869.806,00 | 21.871.869.806,00 | (4.481.514.795,00) |
| 5.1.1.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan | 7.962.385.288,00 | 0,00 | 7.296.960.806,00 | 7.296.960.806,00 | (665.424.482,00) |
| 5.1.1.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional | 15.513.420.375,00 | 0,00 | 14.375.968.000,00 | 14.375.968.000,00 | (1.137.452.375,00) |
| 5.1.1.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum | 4.799.619.375,00 | 0,00 | 4.750.145.000,00 | 4.750.145.000,00 | (49.474.375,00) |
| 5.1.1.01.06 | Belanja Tunjangan Bersas | 15.271.693.939,00 | 0,00 | 12.115.446.925,00 | 12.115.446.925,00 | (3.156.247.014,00) |

SIPYAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 6 dari 20

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5.1.6.02.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada | 3.517.500.000,00 | 0,00 | 3.490.600.000,00 | 3.490.600.000,00 | (26.900.000,00) |
| 5.1.6.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat | 2.375.000.000,00 | 0,00 | 2.370.450.000,00 | 2.370.450.000,00 | (4.550.000,00) |
| 5.1.6.03.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat | 2.375.000.000,00 | 0,00 | 2.370.450.000,00 | 2.370.450.000,00 | (4.550.000,00) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 317.507.572.481,00 | 0,00 | 263.508.924.061,00 | 263.508.924.061,00 | (53.998.648.420,00) |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 7.164.873.275,00 | 0,00 | 6.019.749.799,00 | 6.019.749.799,00 | (1.145.123.476,00) |
| 5.2.1.06 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolum Ikan | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 908.388.253,00 | 908.388.253,00 | (91.611.747,00) |
| 5.2.1.06.02 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolum Ikan Air Tawar | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 908.388.253,00 | 908.388.253,00 | (91.611.747,00) |
| 5.2.1.08 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandung/Rusak | 30.000.000,00 | 0,00 | 29.981.600,00 | 29.981.600,00 | (18.400,00) |
| 5.2.1.08.01 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus | 30.000.000,00 | 0,00 | 29.981.600,00 | 29.981.600,00 | (18.400,00) |
| 5.2.1.11 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 5.934.873.275,00 | 0,00 | 4.882.195.491,00 | 4.882.195.491,00 | (1.052.677.784,00) |
| 5.2.1.11.02 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 90.873.275,00 | 0,00 | 34.787.760,00 | 34.787.760,00 | (56.085.515,00) |
| 5.2.1.11.04 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.11.05 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong | 5.839.000.000,00 | 0,00 | 4.842.407.731,00 | 4.842.407.731,00 | (996.592.269,00) |
| 5.2.1.13 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 200.000.000,00 | 0,00 | 199.184.455,00 | 199.184.455,00 | (815.545,00) |
| 5.2.1.13.01 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga | 200.000.000,00 | 0,00 | 199.184.455,00 | 199.184.455,00 | (815.545,00) |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 86.301.790.477,00 | 0,00 | 75.487.583.872,00 | 75.487.583.872,00 | (10.814.206.605,00) |
| 5.2.2.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu | 570.218.750,00 | 0,00 | 559.266.000,00 | 559.266.000,00 | (10.952.750,00) |
| 5.2.2.03.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa | 5.718.750,00 | 0,00 | 5.718.000,00 | 5.718.000,00 | (750,00) |
| 5.2.2.03.07 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan | 562.000.000,00 | 0,00 | 551.048.000,00 | 551.048.000,00 | (10.952.000,00) |
| 5.2.2.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 6.375.300.000,00 | 0,00 | 6.076.302.225,00 | 6.076.302.225,00 | (298.997.775,00) |
| 5.2.2.04.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang | 3.445.000.000,00 | 0,00 | 3.432.506.400,00 | 3.432.506.400,00 | (12.493.600,00) |
| 5.2.2.04.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 530.000.000,00 | 0,00 | 349.615.000,00 | 349.615.000,00 | (180.385.000,00) |
| 5.2.2.04.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus | 500.000.000,00 | 0,00 | 498.300.000,00 | 498.300.000,00 | (1.700.000,00) |
| 5.2.2.04.05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 1.899.800.000,00 | 0,00 | 1.795.880.825,00 | 1.795.880.825,00 | (103.919.175,00) |
| 5.2.2.07 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 64.574.112,00 | 0,00 | 64.206.000,00 | 64.206.000,00 | (368.112,00) |
| 5.2.2.07.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 |

SIPYAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 12 dari 20

Lampiran 4: Data Penelitian Tahun 2020

DATA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| I | PENDAPATAN - LRA | 1.319.983.684.574,00 | 0,00 | 1.327.545.973.658,59 | 1.327.545.973.658,59 | 7.562.289.084,59 |
| I.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 159.371.121.210,00 | 0,00 | 149.925.456.946,59 | 149.925.456.946,59 | (9.445.664.263,41) |
| I.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 18.938.112.750,00 | 0,00 | 21.169.676.518,59 | 21.169.676.518,59 | 2.231.563.768,59 |
| I.1.1.06 | Pajak Hotel - LRA | 130.000.000,00 | 0,00 | 161.369.900,00 | 161.369.900,00 | 31.369.900,00 |
| I.1.1.06.01 | Hotel - LRA | 100.000.000,00 | 0,00 | 132.669.900,00 | 132.669.900,00 | 32.669.900,00 |
| I.1.1.06.03 | Loamen - LRA | 30.000.000,00 | 0,00 | 28.700.000,00 | 28.700.000,00 | (1.300.000,00) |
| I.1.1.07 | Pajak Restoran - LRA | 2.450.000.000,00 | 0,00 | 3.337.456.311,60 | 3.337.456.311,60 | 887.456.311,60 |
| I.1.1.07.01 | Restoran - LRA | 700.000.000,00 | 0,00 | 763.136.814,00 | 763.136.814,00 | 63.136.814,00 |
| I.1.1.07.02 | Rumah Makan - LRA | 30.000.000,00 | 0,00 | 57.790.000,00 | 57.790.000,00 | 27.790.000,00 |
| I.1.1.07.03 | Kafetaria - LRA | 20.000.000,00 | 0,00 | 48.825.000,00 | 48.825.000,00 | 28.825.000,00 |
| I.1.1.07.05 | Warung - LRA | 1.700.000.000,00 | 0,00 | 2.467.704.497,60 | 2.467.704.497,60 | 767.704.497,60 |
| I.1.1.08 | Pajak Hiburan - LRA | 120.000.000,00 | 0,00 | 158.034.375,65 | 158.034.375,65 | 38.034.375,65 |
| I.1.1.08.02 | Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA | 100.000.000,00 | 0,00 | 59.049.236,50 | 59.049.236,50 | (40.950.763,50) |
| I.1.1.08.08 | Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Katagkanan - LRA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000.000,00) |
| I.1.1.08.09 | Panti Jajat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA | 3.500.000,00 | 0,00 | 798.000,00 | 798.000,00 | (2.702.000,00) |
| I.1.1.08.10 | Pertandingan Olahraga - LRA | 14.500.000,00 | 0,00 | 98.187.130,15 | 98.187.130,15 | 83.687.130,15 |
| I.1.1.09 | Pajak Reklame - LRA | 350.000.000,00 | 0,00 | 399.184.219,24 | 399.184.219,24 | 49.184.219,24 |
| I.1.1.09.01 | Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron - LRA | 280.000.000,00 | 0,00 | 345.796.206,74 | 345.796.206,74 | 65.796.206,74 |
| I.1.1.09.02 | Reklame Kain - LRA | 68.000.000,00 | 0,00 | 39.419.462,50 | 39.419.462,50 | (28.580.537,50) |
| I.1.1.09.03 | Reklame Helaian/Silok - LRA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000.000,00) |
| I.1.1.09.05 | Reklame Berjalan - LRA | 0,00 | 0,00 | 13.968.550,00 | 13.968.550,00 | 13.968.550,00 |
| I.1.1.10 | Pajak Penerangan Jalan - LRA | 9.250.000.000,00 | 0,00 | 9.998.375.113,00 | 9.998.375.113,00 | 748.375.113,00 |
| I.1.1.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA | 9.250.000.000,00 | 0,00 | 9.998.375.113,00 | 9.998.375.113,00 | 748.375.113,00 |
| I.1.1.11 | Pajak Parkir - LRA | 11.500.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | (500.000,00) |
| I.1.1.11.01 | Pajak Parkir - LRA | 11.500.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | (500.000,00) |
| I.1.1.12 | Pajak Air Tanah - LRA | 40.000.000,00 | 0,00 | 41.354.154,00 | 41.354.154,00 | 1.354.154,00 |
| I.1.1.12.01 | Pajak Air Tanah - LRA | 40.000.000,00 | 0,00 | 41.354.154,00 | 41.354.154,00 | 1.354.154,00 |
| I.1.1.13 | Pajak Sarang Burung Walet - LRA | 25.000.000,00 | 0,00 | 34.550.000,00 | 34.550.000,00 | 9.550.000,00 |
| I.1.1.13.01 | Pajak Sarang Burung Walet - LRA | 25.000.000,00 | 0,00 | 34.550.000,00 | 34.550.000,00 | 9.550.000,00 |

DAFTAR REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 21

38 | B | S | 0 | 0

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4.1.1.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.434.535.400,00 | 1.434.535.400,00 | 434.535.400,00 |
| 4.1.1.14.07 | Tanah Liat - LRA | 0,00 | 0,00 | 1.792.800,00 | 1.792.800,00 | 1.792.800,00 |
| 4.1.1.14.08 | Tanah Timbun - LRA | 400.000.000,00 | 0,00 | 200.488.875,00 | 200.488.875,00 | (199.511.125,00) |
| 4.1.1.14.09 | Pajak - LRA | 150.000.000,00 | 0,00 | 187.036.745,00 | 187.036.745,00 | 37.036.745,00 |
| 4.1.1.14.23 | Pasir dan Korail - LRA | 150.000.000,00 | 0,00 | 528.095.450,00 | 528.095.450,00 | 378.095.450,00 |
| 4.1.1.14.38 | Pasir Urug - LRA | 50.000.000,00 | 0,00 | 51.362.100,00 | 51.362.100,00 | 1.362.100,00 |
| 4.1.1.14.39 | Korail - LRA | 150.000.000,00 | 0,00 | 320.327.205,00 | 320.327.205,00 | 170.327.205,00 |
| 4.1.1.14.40 | Korai/Batu Kal - LRA | 100.000.000,00 | 0,00 | 145.432.425,00 | 145.432.425,00 | 45.432.425,00 |
| 4.1.1.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA | 1.561.612.750,00 | 0,00 | 1.325.211.848,10 | 1.325.211.848,10 | (236.400.901,90) |
| 4.1.1.15.01 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA | 1.561.612.750,00 | 0,00 | 1.325.211.848,10 | 1.325.211.848,10 | (236.400.901,90) |
| 4.1.1.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPHTB) - LRA | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 4.268.605.157,00 | 4.268.605.157,00 | 268.605.157,00 |
| 4.1.1.16.01 | SPHTB | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 4.268.605.157,00 | 4.268.605.157,00 | 268.605.157,00 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 7.066.547.800,00 | 0,00 | 6.526.045.050,00 | 6.526.045.050,00 | (540.502.810,00) |
| 4.1.2.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA | 3.053.000.000,00 | 0,00 | 2.606.921.500,00 | 2.606.921.500,00 | (446.078.500,00) |
| 4.1.2.01.01 | Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA | 3.028.000.000,00 | 0,00 | 2.554.343.500,00 | 2.554.343.500,00 | (473.656.500,00) |
| 4.1.2.01.06 | Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Diteliti dan/atau Diteliti oleh Pemda - LRA | 25.000.000,00 | 0,00 | 52.578.000,00 | 52.578.000,00 | 27.578.000,00 |
| 4.1.2.02 | Retribusi Pelayanan Perampangan/Kebudayaan - LRA | 564.435.000,00 | 0,00 | 665.360.000,00 | 665.360.000,00 | 100.925.000,00 |
| 4.1.2.02.01 | Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA | 564.435.000,00 | 0,00 | 665.360.000,00 | 665.360.000,00 | 100.925.000,00 |
| 4.1.2.05 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA | 120.000.000,00 | 0,00 | 121.500.000,00 | 121.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4.1.2.05.01 | Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA | 120.000.000,00 | 0,00 | 121.500.000,00 | 121.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4.1.2.06 | Retribusi Pelayanan Pasar - LRA | 260.100.000,00 | 0,00 | 167.442.000,00 | 167.442.000,00 | (92.658.000,00) |
| 4.1.2.06.02 | Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA | 80.065.000,00 | 0,00 | 96.350.000,00 | 96.350.000,00 | 16.285.000,00 |
| 4.1.2.06.03 | Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA | 180.035.000,00 | 0,00 | 71.092.000,00 | 71.092.000,00 | (108.943.000,00) |
| 4.1.2.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA | 100.000.000,00 | 0,00 | 87.638.000,00 | 87.638.000,00 | (12.362.000,00) |
| 4.1.2.07.03 | Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Mobilus - LRA | 48.125,00 | 0,00 | 1.343.000,00 | 1.343.000,00 | 1.294.875,00 |
| 4.1.2.07.04 | Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA | 10.062.500,00 | 0,00 | 6.429.000,00 | 6.429.000,00 | (3.633.500,00) |
| 4.1.2.07.05 | Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA | 496.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | (381.000,00) |
| 4.1.2.07.06 | Retribusi PKB - Mobil Sarang/Seban - PCK Isp - LRA | 38.940.000,00 | 0,00 | 33.886.000,00 | 33.886.000,00 | (5.054.000,00) |
| 4.1.2.07.07 | Retribusi PKB - Mobil Sarang/Seban - Light Truck - LRA | 32.950.000,00 | 0,00 | 26.835.000,00 | 26.835.000,00 | (6.115.000,00) |
| 4.1.2.07.08 | Retribusi PKB - Mobil Sarang/Seban - Truck - LRA | 17.573.375,00 | 0,00 | 19.030.000,00 | 19.030.000,00 | 1.456.625,00 |
| 4.1.2.08 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (220.000,00) |
| 4.1.2.08.01 | Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (220.000,00) |
| 4.1.2.10 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kulkas - LRA | 150.225.000,00 | 0,00 | 217.750.000,00 | 217.750.000,00 | 67.525.000,00 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 21

38 | B | S | 0 | 0

Lampiran 4– Lanjutan

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4.2.1.05.06 | Aktivitas Puskesmas - LRA | 683.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (683.128.000,00) |
| 4.2.1.05.07 | Jaminan Persalinan - LRA | 610.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (610.726.000,00) |
| 4.2.1.05.08 | Bantuan Operasional Kelangka Berencana - LRA | 4.489.239.607,00 | 0,00 | 4.460.652.537,00 | 4.460.652.537,00 | (28.587.070,00) |
| 4.2.1.05.11 | Tunjangan Khusus Guru - LRA | 2.499.701.000,00 | 0,00 | 3.448.562.000,00 | 3.448.562.000,00 | 948.861.000,00 |
| 4.2.1.05.13 | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA | 728.388.562,00 | 0,00 | 827.918.622,00 | 827.918.622,00 | 99.530.060,00 |
| 4.2.1.05.15 | Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LRA | 1.114.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.114.250.000,00) |
| 4.2.1.05.16 | Pengawasan Obat dan Makanan - LRA | 175.552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (175.552.000,00) |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 363.777.199.320,00 | 0,00 | 363.070.641.320,00 | 363.070.641.320,00 | (706.558.000,00) |
| 4.2.2.01 | Dana Otonomi Khusus - LRA | 74.324.170.320,00 | 0,00 | 74.324.170.320,00 | 74.324.170.320,00 | 0,00 |
| 4.2.2.01.01 | Dana Otonomi Khusus - LRA | 74.324.170.320,00 | 0,00 | 74.324.170.320,00 | 74.324.170.320,00 | 0,00 |
| 4.2.2.03 | Dana Penyesuaian - LRA | 289.453.029.000,00 | 0,00 | 288.746.471.000,00 | 288.746.471.000,00 | (706.558.000,00) |
| 4.2.2.03.03 | Dana Insentif Daerah - LRA | 38.820.701.000,00 | 0,00 | 38.820.701.000,00 | 38.820.701.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2.03.06 | Pendapatan Transfer Dana Desa dari APBN - LRA | 250.632.328.000,00 | 0,00 | 249.925.770.000,00 | 249.925.770.000,00 | (706.558.000,00) |
| 4.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 27.939.785.387,00 | 0,00 | 37.337.990.754,00 | 37.337.990.754,00 | 9.398.205.367,00 |
| 4.2.3.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 27.939.785.387,00 | 0,00 | 37.337.990.754,00 | 37.337.990.754,00 | 9.398.205.367,00 |
| 4.2.3.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 27.939.785.387,00 | 0,00 | 37.337.990.754,00 | 37.337.990.754,00 | 9.398.205.367,00 |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan - LRA | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.01.01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Aceh - LRA | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 28.396.678.000,00 | 0,00 | 26.476.200.000,00 | 26.476.200.000,00 | (1.920.478.000,00) |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah - LRA | 28.396.678.000,00 | 0,00 | 26.476.200.000,00 | 26.476.200.000,00 | (1.920.478.000,00) |
| 4.3.1.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA | 26.396.678.000,00 | 0,00 | 26.476.200.000,00 | 26.476.200.000,00 | 79.522.000,00 |
| 4.3.1.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 26.396.678.000,00 | 0,00 | 26.476.200.000,00 | 26.476.200.000,00 | 79.522.000,00 |
| 4.3.1.03 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000.000.000,00) |
| 4.3.1.03.01 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000.000.000,00) |
| 5 | BELANJA | 1.104.772.167.316,89 | 0,00 | 993.468.521.285,57 | 993.468.521.285,57 | (111.303.646.031,32) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 810.155.630.816,89 | 0,00 | 720.662.431.926,46 | 720.662.431.926,46 | (89.493.198.890,43) |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 579.378.528.184,52 | 0,00 | 520.124.330.390,00 | 520.124.330.390,00 | (59.254.197.794,52) |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 401.930.107.938,52 | 0,00 | 369.536.481.879,00 | 369.536.481.879,00 | (32.393.626.059,52) |
| 5.1.1.01.01 | Belanja Gaji Pokok PNS (Uang Representasi) | 257.688.002.656,62 | 0,00 | 241.289.844.505,00 | 241.289.844.505,00 | (16.398.158.151,62) |
| 5.1.1.01.02 | Belanja Tunjangan Kelangka | 23.644.347.110,00 | 0,00 | 21.503.627.221,00 | 21.503.627.221,00 | (2.140.719.889,00) |
| 5.1.1.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan | 8.192.291.548,00 | 0,00 | 7.420.798.900,00 | 7.420.798.900,00 | (771.492.648,00) |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 6 dari 21

| KODE REKENING | URAIAN | ANGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4.2.1.05.06 | Aktivitas Puskesmas - LRA | 683.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (683.128.000,00) |
| 4.2.1.05.07 | Jaminan Persalinan - LRA | 610.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (610.726.000,00) |
| 4.2.1.05.08 | Bantuan Operasional Kelangka Berencana - LRA | 4.489.239.607,00 | 0,00 | 4.460.652.537,00 | 4.460.652.537,00 | (28.587.070,00) |
| 4.2.1.05.11 | Tunjangan Khusus Guru - LRA | 2.499.701.000,00 | 0,00 | 3.448.562.000,00 | 3.448.562.000,00 | 948.861.000,00 |
| 4.2.1.05.13 | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA | 728.388.562,00 | 0,00 | 827.918.622,00 | 827.918.622,00 | 99.530.060,00 |
| 4.2.1.05.15 | Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LRA | 1.114.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.114.250.000,00) |
| 4.2.1.05.16 | Pengawasan Obat dan Makanan - LRA | 175.552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (175.552.000,00) |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 363.777.199.320,00 | 0,00 | 363.070.641.320,00 | 363.070.641.320,00 | (706.558.000,00) |
| 4.2.2.01 | Dana Otonomi Khusus - LRA | 74.324.170.320,00 | 0,00 | 74.324.170.320,00 | 74.324.170.320,00 | 0,00 |
| 4.2.2.01.01 | Dana Otonomi Khusus - LRA | 74.324.170.320,00 | 0,00 | 74.324.170.320,00 | 74.324.170.320,00 | 0,00 |
| 4.2.2.03 | Dana Penyesuaian - LRA | 289.453.029.000,00 | 0,00 | 288.746.471.000,00 | 288.746.471.000,00 | (706.558.000,00) |
| 4.2.2.03.03 | Dana Insentif Daerah - LRA | 38.820.701.000,00 | 0,00 | 38.820.701.000,00 | 38.820.701.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2.03.06 | Pendapatan Transfer Dana Desa dari APBN - LRA | 250.632.328.000,00 | 0,00 | 249.925.770.000,00 | 249.925.770.000,00 | (706.558.000,00) |
| 4.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 27.939.785.387,00 | 0,00 | 37.337.990.754,00 | 37.337.990.754,00 | 9.398.205.367,00 |
| 4.2.3.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 27.939.785.387,00 | 0,00 | 37.337.990.754,00 | 37.337.990.754,00 | 9.398.205.367,00 |
| 4.2.3.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 27.939.785.387,00 | 0,00 | 37.337.990.754,00 | 37.337.990.754,00 | 9.398.205.367,00 |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan - LRA | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.01.01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Aceh - LRA | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 28.396.678.000,00 | 0,00 | 26.476.200.000,00 | 26.476.200.000,00 | (1.920.478.000,00) |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah - LRA | 28.396.678.000,00 | 0,00 | 26.476.200.000,00 | 26.476.200.000,00 | (1.920.478.000,00) |
| 4.3.1.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA | 26.396.678.000,00 | 0,00 | 26.476.200.000,00 | 26.476.200.000,00 | 79.522.000,00 |
| 4.3.1.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 26.396.678.000,00 | 0,00 | 26.476.200.000,00 | 26.476.200.000,00 | 79.522.000,00 |
| 4.3.1.03 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000.000.000,00) |
| 4.3.1.03.01 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000.000.000,00) |
| 5 | BELANJA | 1.104.772.167.316,89 | 0,00 | 993.468.521.285,57 | 993.468.521.285,57 | (111.303.646.031,32) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 810.155.630.816,89 | 0,00 | 720.662.431.926,46 | 720.662.431.926,46 | (89.493.198.890,43) |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 579.378.528.184,52 | 0,00 | 520.124.330.390,00 | 520.124.330.390,00 | (59.254.197.794,52) |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 401.930.107.938,52 | 0,00 | 369.536.481.879,00 | 369.536.481.879,00 | (32.393.626.059,52) |
| 5.1.1.01.01 | Belanja Gaji Pokok PNS (Uang Representasi) | 257.688.002.656,62 | 0,00 | 241.289.844.505,00 | 241.289.844.505,00 | (16.398.158.151,62) |
| 5.1.1.01.02 | Belanja Tunjangan Kelangka | 23.644.347.110,00 | 0,00 | 21.503.627.221,00 | 21.503.627.221,00 | (2.140.719.889,00) |
| 5.1.1.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan | 8.192.291.548,00 | 0,00 | 7.420.798.900,00 | 7.420.798.900,00 | (771.492.648,00) |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 6 dari 21

Lampiran 5: Data Penelitian Tahun 2021

DATA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

| KODE KENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | PERSENTASE (%) | LEBIH / (KURANG) |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | PERIODE INI | | |
| | | | | | | | |
| | PENDAPATAN DAERAH | 1.321.062.239.778.00 | 1.142.219.492.165.58 | 198.286.841.288.43 | 1.340.506.333.454.01 | 101.47 | 19.444.093.676.01 |
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 137.850.088.304.00 | 96.821.891.523.58 | 37.817.342.760.43 | 134.639.234.284.01 | 97.67 | (3.210.854.019.99) |
| .1 | Pajak Daerah | 22.887.298.758.00 | 20.707.707.135.47 | 3.838.660.172.00 | 24.546.367.307.47 | 107.25 | 1.659.068.549.47 |
| .1.35 | Pajak Hotel | 189.000.000.00 | 156.446.000.00 | 37.359.000.00 | 191.805.000.00 | 102.54 | 4.805.000.00 |
| .1.43 | Pajak Restoran | 3.453.708.758.00 | 3.987.732.389.40 | 945.528.735.00 | 4.533.261.024.40 | 131.25 | 1.079.462.266.40 |
| .1.51 | Pajak Hiburan | 200.000.000.00 | 149.391.993.50 | 14.880.742.00 | 164.272.735.50 | 82.14 | (35.727.264.50) |
| .1.60 | Pajak Reklame | 450.000.000.00 | 374.565.920.62 | 40.638.192.00 | 415.204.112.62 | 92.27 | (34.795.887.38) |
| .1.71 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 9.000.000.000.00 | 9.269.124.797.00 | 901.294.308.00 | 10.170.409.105.00 | 103.78 | 370.409.105.00 |
| .1.72 | Pajak Parkir | 4.500.000.00 | 0.00 | 6.758.000.00 | 6.758.000.00 | 194.62 | 4.258.000.00 |
| .1.73 | paik Air tanah | 50.000.000.00 | 75.097.686.00 | 0.00 | 75.097.686.00 | 150.20 | 25.097.686.00 |
| .1.74 | Pajak sarang burung walet | 40.000.000.00 | 41.550.000.00 | 1.000.000.00 | 42.550.000.00 | 106.38 | 2.550.000.00 |
| .1.11 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 1.500.000.000.00 | 1.213.990.030.00 | 442.202.980.00 | 1.656.192.410.00 | 110.41 | 156.192.410.00 |
| .1.12 | PBBPT | 1.700.000.000.00 | 1.514.746.672.00 | 163.258.738.00 | 1.678.005.410.00 | 98.71 | (21.974.000.00) |
| .1.14 | BPHB Pemberian Hak Baru | 5.500.000.000.00 | 4.325.041.746.95 | 1.283.750.087.00 | 5.608.791.833.95 | 101.98 | 108.791.833.95 |
| 2 | Retribusi Daerah | 7.592.292.866.00 | 5.216.560.260.00 | 676.150.371.55 | 5.892.710.631.55 | 77.61 | (1.699.582.234.45) |
| .2.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 3.088.000.000.00 | 1.789.282.750.00 | 396.134.816.55 | 2.185.417.566.55 | 70.77 | (902.582.433.45) |
| .2.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 3.028.000.000.00 | 1.722.165.550.00 | 389.676.816.55 | 2.111.842.366.55 | 69.74 | (916.155.633.45) |
| .2.01.06 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya | 60.000.000.00 | 67.117.200.00 | 6.458.000.00 | 73.573.200.00 | 0.00 | 13.573.200.00 |
| .2.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 734.400.000.00 | 537.965.000.00 | 69.415.000.00 | 607.380.000.00 | 82.70 | (127.020.000.00) |
| .2.02.01 | Retribusi Pelayanan Persampahan | 734.400.000.00 | 537.965.000.00 | 69.415.000.00 | 607.380.000.00 | 82.70 | (127.020.000.00) |
| .2.04 | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 120.000.000.00 | 129.550.000.00 | 10.000.000.00 | 139.550.000.00 | 116.29 | 19.550.000.00 |
| .2.04.01 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 120.000.000.00 | 129.550.000.00 | 10.000.000.00 | 139.550.000.00 | 116.29 | 19.550.000.00 |
| .2.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 203.000.000.00 | 102.544.000.00 | 13.767.000.00 | 116.311.000.00 | 57.30 | (86.689.000.00) |
| .2.05.02 | Retribusi Los | 58.565.000.00 | 32.500.000.00 | 7.000.000.00 | 39.500.000.00 | 67.45 | (19.065.000.00) |
| .2.05.03 | Retribusi Kios | 144.435.000.00 | 70.044.000.00 | 6.767.000.00 | 76.811.000.00 | 53.18 | (67.624.000.00) |
| .2.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 114.359.000.00 | 19.340.000.00 | 6.295.000.00 | 25.635.000.00 | 22.43 | (88.704.000.00) |
| .2.06.01 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 114.359.000.00 | 19.340.000.00 | 6.295.000.00 | 25.635.000.00 | 22.43 | (88.704.000.00) |
| .2.07 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kabakaran | 140.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (140.000.00) |
| .2.07.01 | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam | 140.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (140.000.00) |
| .2.09 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 179.900.000.00 | 151.900.000.00 | 44.325.000.00 | 196.225.000.00 | 109.07 | 16.325.000.00 |
| .2.09.01 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 179.900.000.00 | 151.900.000.00 | 44.325.000.00 | 196.225.000.00 | 109.07 | 16.325.000.00 |
| .2.11 | Retribusi Tera/Ters Utang | 51.000.000.00 | 53.172.000.00 | 10.000.000.00 | 63.252.000.00 | 124.02 | 12.252.000.00 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | PERSENTASE (%) | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | PERIODE INI | | |
| | | | | | | | |
| 4.1.2.11.01 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat | 51.000.000.00 | 53.172.000.00 | 10.000.000.00 | 63.252.000.00 | 124.02 | 12.252.000.00 |
| 4.1.2.13 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Mersa Telekomunikasi | 123.637.860.00 | 124.074.280.00 | 5.522.400.00 | 129.596.680.00 | 105.06 | 6.958.820.00 |
| 4.1.2.13.01 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian | 123.637.860.00 | 124.074.280.00 | 5.522.400.00 | 129.596.680.00 | 105.06 | 6.958.820.00 |
| 4.1.2.14 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.545.188.000.00 | 1.046.110.980.00 | 59.611.880.00 | 1.105.722.860.00 | 71.56 | (439.465.140.00) |
| 4.1.2.14.01 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 618.300.000.00 | 663.556.980.00 | 8.512.000.00 | 662.068.980.00 | 107.08 | 43.768.980.00 |
| 4.1.2.14.03 | Retribusi Penyewaan Bangunan | 20.000.000.00 | 17.000.000.00 | 3.000.000.00 | 20.000.000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4.1.2.14.04 | Retribusi Penyewaan Laboratorium | 5.000.000.00 | 0.00 | 7.159.880.00 | 7.159.880.00 | 143.20 | 2.159.880.00 |
| 4.1.2.14.05 | Retribusi Pemakaian Ruang | 25.000.000.00 | 14.000.000.00 | 8.500.000.00 | 22.500.000.00 | 90.00 | (2.500.000.00) |
| 4.1.2.14.06 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | 134.388.000.00 | 36.400.000.00 | 10.000.000.00 | 46.400.000.00 | 34.53 | (87.988.000.00) |
| 4.1.2.14.07 | Retribusi Pemakaian Alat | 742.500.000.00 | 325.160.000.00 | 22.440.000.00 | 347.600.000.00 | 46.81 | (394.900.000.00) |
| 4.1.2.15 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 987.200.000.00 | 894.350.000.00 | 19.450.000.00 | 913.800.000.00 | 92.56 | (73.400.000.00) |
| 4.1.2.15.02 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikorbankan | 987.200.000.00 | 894.350.000.00 | 19.450.000.00 | 913.800.000.00 | 92.56 | (73.400.000.00) |
| 4.1.2.17 | Retribusi Terminal | 199.468.000.00 | 132.077.000.00 | 22.137.500.00 | 154.214.500.00 | 77.31 | (45.253.500.00) |
| 4.1.2.17.01 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan dan Bus Umum | 98.513.000.00 | 91.457.000.00 | 8.797.500.00 | 100.254.500.00 | 101.77 | 1.741.500.00 |
| 4.1.2.17.02 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.17.03 | Retribusi pelayanan penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 100.955.000.00 | 40.620.000.00 | 13.340.000.00 | 53.960.000.00 | 53.45 | (46.995.000.00) |
| 4.1.2.18 | Retribusi Tempat Khusus Driver | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.18.01 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.20 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 100.000.000.00 | 93.570.000.00 | 8.800.000.00 | 102.370.000.00 | 102.37 | 2.370.000.00 |
| 4.1.2.20.01 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 100.000.000.00 | 93.570.000.00 | 8.800.000.00 | 102.370.000.00 | 102.37 | 2.370.000.00 |
| 4.1.2.21 | Retribusi Pelayanan Kependidikan | 15.600.000.00 | 5.351.750.00 | 96.000.00 | 5.447.750.00 | 34.92 | (10.152.250.00) |
| 4.1.2.21.01 | Retribusi Pelayanan Kependidikan | 15.600.000.00 | 5.351.750.00 | 96.000.00 | 5.447.750.00 | 34.92 | (10.152.250.00) |
| 4.1.2.23 | Retribusi Penyewaan di Air | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.23.01 | Retribusi Pelayanan Penyewaan Orang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.25 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 105.000.000.00 | 118.912.500.00 | 10.115.775.00 | 129.028.275.00 | 122.88 | 24.028.275.00 |
| 4.1.2.25.01 | Retribusi Pembenaran Izin Mendirikan Bangunan | 105.000.000.00 | 118.912.500.00 | 10.115.775.00 | 129.028.275.00 | 122.88 | 24.028.275.00 |
| 4.1.2.27 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan umum | 5.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (5.000.000.00) |
| 4.1.2.27.01 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan umum | 5.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (5.000.000.00) |
| 4.1.2.28 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | 21.000.000.00 | 18.340.000.00 | 0.00 | 18.340.000.00 | 87.33 | (2.660.000.00) |
| 4.1.2.28.01 | Retribusi Pembenaran Izin Kegiatan Usaha Perikanan Ikan | 21.000.000.00 | 18.340.000.00 | 0.00 | 18.340.000.00 | 87.33 | (2.660.000.00) |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.679.706.001.00 | 4.794.752.297.54 | 0.00 | 4.794.752.297.54 | 102.46 | 115.046.296.54 |
| 4.1.3.02 | Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan Modal Pada BUMD (lembaga Keuangan) | 4.679.706.001.00 | 4.794.752.297.54 | 0.00 | 4.794.752.297.54 | 102.46 | 115.046.296.54 |
| 4.1.3.02.01 | Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan Modal Pada BUMD (lembaga Keuangan) | 4.679.706.001.00 | 4.794.752.297.54 | 0.00 | 4.794.752.297.54 | 102.46 | 115.046.296.54 |
| 4.1.4 | Lain-Lain PAD yang Sah | 102.690.790.685.00 | 66.102.871.830.57 | 33.302.532.216.88 | 99.405.404.047.45 | 96.80 | (3.285.386.637.55) |
| 4.1.4.02 | Hasil Penjualan Peralat dan Mesin | 503.916.000.00 | 994.905.187.32 | 0.00 | 994.905.187.32 | 197.43 | 490.989.187.32 |
| 4.1.4.02.02 | Hasil Penjualan Alat dan Angkutan | 503.916.000.00 | 972.871.954.00 | 0.00 | 972.871.954.00 | 193.06 | 468.955.954.00 |
| 4.1.4.02.05 | Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 0.00 | 22.067.233.32 | 0.00 | 22.067.233.32 | 0.00 | 22.067.233.32 |
| 4.1.4.19 | Jasa Giro Pada Kas Daerah | 1.260.000.000.00 | 779.409.219.19 | 30.578.751.69 | 809.987.970.88 | 64.28 | (450.012.029.12) |
| 4.1.4.19.01 | Jasa Giro Pada Kas Daerah | 1.260.000.000.00 | 779.409.219.19 | 30.578.751.69 | 809.987.970.88 | 64.28 | (450.012.029.12) |
| 4.1.4.25 | Pendapatan Bunga atas Pemsetoran Uang Pemerintah Daerah | 4.700.000.000.00 | 3.370.635.170.57 | 347.676.226.88 | 3.718.311.400.25 | 79.12 | (981.688.599.75) |

Lampiran 5– Lanjutan

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | PERSENTASE (%) | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | PERIODE INI | | |
| 4.1.4.25.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 4.700.000.000,00 | 3.370.635.170,57 | 347.676.229,68 | 3.718.311.400,25 | 79,12 | (981.488.599,75) |
| 4.1.4.25 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 4.600.000.000,00 | 4.714.123.826,89 | 7.546.063,00 | 4.721.669.889,89 | 102,64 | 121.669.889,89 |
| 4.1.4.26.01 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 4.600.000.000,00 | 4.714.123.826,89 | 7.546.063,00 | 4.721.669.889,89 | 102,64 | 121.669.889,89 |
| 4.1.4.30 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 200.000.000,00 | 61.888.903,30 | 190.011.229,51 | 271.900.132,81 | 135,95 | 71.900.132,81 |
| 4.1.4.30.01 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 200.000.000,00 | 61.888.903,30 | 190.011.229,51 | 271.900.132,81 | 135,95 | 71.900.132,81 |
| 4.1.4.48 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000.000,00) |
| 4.1.4.48.01 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kalkayaan Daerah | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000.000,00) |
| 4.1.4.48.05 | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4.53 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 1.149.476.078,00 | 184.031.164,00 | 18.981.407,00 | 203.012.571,00 | 17,66 | (946.463.507,00) |
| 4.1.4.53.01 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 1.149.476.078,00 | 184.031.164,00 | 18.981.407,00 | 203.012.571,00 | 17,66 | (946.463.507,00) |
| 4.1.4.58 | Pendapatan BLUD | 63.451.322.295,00 | 37.468.731.917,22 | 27.742.687.542,00 | 65.211.419.459,22 | 102,77 | 1.760.087.142,22 |
| 4.1.4.58.01 | Pendapatan BLUD | 63.451.322.295,00 | 37.468.731.917,22 | 27.742.687.542,00 | 65.211.419.459,22 | 102,77 | 1.760.087.142,22 |
| 4.1.4.61 | Pendapatan Dana Kapitas JKN pada PKTP | 14.636.000.000,00 | 6.369.066.749,00 | 2.726.513.322,00 | 11.095.580.071,00 | 75,81 | (3.540.417.929,00) |
| 4.1.4.61.01 | Pendapatan Dana Kapitas JKN pada PKTP | 14.636.000.000,00 | 6.369.066.749,00 | 2.726.513.322,00 | 11.095.580.071,00 | 75,81 | (3.540.417.929,00) |
| 4.1.4.64 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (15.000.000,00) |
| 4.1.4.64.01 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (15.000.000,00) |
| 4.1.4.65 | Pendapatan Zakat | 12.170.076.312,00 | 10.140.077.693,08 | 2.238.139.672,00 | 12.378.217.365,08 | 101,71 | 208.140.652,08 |
| 4.1.4.65.01 | Pendapatan Zakat | 12.170.076.312,00 | 10.140.077.693,08 | 2.238.139.672,00 | 12.378.217.365,08 | 101,71 | 208.140.652,08 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 1.135.043.388.139,00 | 1.017.538.773.217,00 | 180.468.498.328,00 | 1.177.998.271.745,00 | 101,99 | 22.955.883.458,00 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.123.570.576.615,00 | 985.632.581.756,00 | 158.611.890.658,00 | 1.144.244.382.414,00 | 101,84 | 20.673.805.799,00 |
| 4.2.1.01 | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH) | 35.674.657.000,00 | 40.211.790.205,00 | 19.402.469.099,00 | 59.614.259.304,00 | 167,11 | 23.939.602.304,00 |
| 4.2.1.01.01 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 5.907.628.000,00 | 14.712.831.985,00 | 3.801.977.538,00 | 18.514.809.523,00 | 313,41 | 12.607.181.523,00 |
| 4.2.1.01.02 | DBH PPH Pasal 21 | 6.039.433.000,00 | 7.260.228.947,00 | 5.010.613.386,00 | 7.890.842.383,00 | 128,17 | 1.761.409.383,00 |
| 4.2.1.01.03 | DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/PPQPDN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.01.04 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 176.996.000,00 | 170.804.381,00 | 36.988.555,00 | 207.792.936,00 | 117,35 | 30.796.936,00 |
| 4.2.1.01.05 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 27.445.000,00 | 34.595.850,00 | 9.605.750,00 | 44.201.600,00 | 161,06 | 16.756.600,00 |
| 4.2.1.01.06 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 0,00 | 4.033.961,00 | 1.239.114,00 | 5.263.075,00 | 0,00 | 5.263.075,00 |
| 4.2.1.01.07 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 15.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594.135,00 | 296,78 | 29.134.135,00 |
| 4.2.1.01.08 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara - Landrent | 22.366.967.000,00 | 12.026.168.437,00 | 280.186.900,00 | 12.306.355.337,00 | 55,02 | (10.060.611.663,00) |
| 4.2.1.01.09 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara- | 0,00 | 4.828.986.600,00 | 14.283.760.230,00 | 19.112.746.830,00 | 0,00 | 19.112.746.830,00 |
| 4.2.1.01.10 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Keluhan- Provinsi Sumber Daya Hutan | 0,00 | 28.204.892,00 | 0,00 | 28.204.892,00 | 0,00 | 28.204.892,00 |
| 4.2.1.01.12 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) | 12.409.000,00 | 2.075.038,00 | 12.078.800,00 | 14.153.847,00 | 114,06 | 1.744.847,00 |
| 4.2.1.01.13 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.128.319.000,00 | 1.013.670.342,00 | 394.911.650,00 | 1.408.581.992,00 | 124,94 | 280.262.992,00 |
| 4.2.1.02 | Dana Transfer Umum- Dana Abkasi Umum (DAU) | 543.825.941.000,00 | 543.825.941.000,00 | 0,00 | 543.825.941.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.1.02.01 | DAU | 543.825.941.000,00 | 543.825.941.000,00 | 0,00 | 543.825.941.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.1.02.03 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.02.04 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Abkasi Khusus (DAK) Fisik | 139.941.415.458,00 | 103.049.005.546,00 | 34.011.094.271,00 | 137.060.009.817,00 | 97,94 | (2.881.405.641,00) |
| 4.2.1.03.01 | DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 453.430.000,00 | 315.706.918,00 | 133.598.456,00 | 449.305.374,00 | 99,17 | (3.764.626,00) |
| 4.2.1.03.02 | DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 26.522.671.000,00 | 18.366.808.177,00 | 7.737.948.329,00 | 26.124.756.506,00 | 98,50 | (397.914.494,00) |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | PERSENTASE (%) | LEBIH / (KURANG) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | PERIODE INI | | |
| 4.2.2.01.03 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Rahan Bakar Kendaraan Bermotor | 12.217.366.180,00 | 13.058.638.004,00 | 0,00 | 13.058.638.004,00 | 106,89 | 841.271.824,00 |
| 4.2.2.01.04 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Air Permukiman | 32.524.779,00 | 37.198.460,00 | 0,00 | 37.198.460,00 | 114,39 | 4.673.681,00 |
| 4.2.2.01.05 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 9.927.084.365,00 | 8.524.254.340,00 | 1.857.697.870,00 | 10.381.952.210,00 | 104,58 | 454.867.845,00 |
| 4.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 28.169.783.135,00 | 27.868.827.425,00 | 0,00 | 27.868.827.425,00 | 98,93 | (300.955.710,00) |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 5.827.985.135,00 | 5.347.049.425,00 | 0,00 | 5.347.049.425,00 | 91,75 | (480.935.710,00) |
| 4.3.1.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.06 | Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri | 5.827.985.135,00 | 5.347.049.425,00 | 0,00 | 5.347.049.425,00 | 91,75 | (480.935.710,00) |
| 4.3.1.06.01 | Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri | 5.827.985.135,00 | 5.347.049.425,00 | 0,00 | 5.347.049.425,00 | 91,75 | (480.935.710,00) |
| 4.3.3 | Lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 22.341.778.000,00 | 22.521.778.000,00 | 0,00 | 22.521.778.000,00 | 100,81 | 180.000,00 |
| 4.3.3.01 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 22.341.778.000,00 | 22.521.778.000,00 | 0,00 | 22.521.778.000,00 | 100,81 | 180.000,00 |
| 4.3.3.01.01 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 22.341.778.000,00 | 22.521.778.000,00 | 0,00 | 22.521.778.000,00 | 100,81 | 180.000,00 |

Meulaboh, 31 DESEMBER 2021
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN ACEH BARAT,

ZULYADI, SE, Ak
 Pembina Utama Muda
 Np.19720828.200112.1.002

Lampiran 6: Analisis Varians Pendapatan

Hasil Perhitungan Analisis Varians Pendapatan Tahun 2017-2021

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Varians Pendapatan (Rp) | (%) | Kriteria |
|-------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------|-------------|
| 2017 | 1.422.813.210.350,69 | 1.364.768.498.288,08 | (58.044.712.062,6) | 95,92 | Kurang Baik |
| 2018 | 1.272.036.731.259,90 | 1.250.681.695.136,38 | (21.355.036.123,5) | 98,32 | Kurang Baik |
| 2019 | 1.425.410.708.131,00 | 1.399.139.190.532,32 | (26.271.517.598,7) | 98,15 | Kurang Baik |
| 2020 | 1.319.983.684.574,00 | 1.327.545.973.658,59 | 7.562.289.085,59 | 100,5 | Baik |
| 2021 | 1.321.062.239.778,00 | 1.340.506.333.454,01 | 19.444.093.676 | 101,4 | Baik |

Lampiran 7: Analisis Varians Belanja

Hasil Perhitungan Analisis Varians Belanja Tahun 2017-2021

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Varians Belanja (Rp) | (%) | Kriteria |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|----------|
| 2017 | 1.464.801.068.660,89 | 1.353.258.094.692,40 | (111.542.973.968) | 92,38 | Baik |
| 2018 | 1.039.708.958.846,78 | 931.754.345.242,00 | (107.954.613.605) | 89,61 | Baik |
| 2019 | 1.193.075.439.237,26 | 1.052.106.351.389,69 | (140.969.087.848) | 88,18 | Baik |
| 2020 | 1.104.772.167.316,89 | 993.468.521.285,57 | (111.303.646.031) | 89,92 | Baik |
| 2021 | 1.421.161.267.425,91 | 1.338.446.864.092,44 | (82.714.403.333) | 94,18 | Baik |

Lampiran 8: Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Hasil Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2017-2021

| Tahun | Realisasi | Pertumbuhan Pendapatan (%) | Kriteria |
|-------|----------------------|----------------------------|----------|
| 2016 | 1.295.102.715.309,55 | – | – |
| 2017 | 1.364.768.498.288,08 | 5,38 | Positif |
| 2018 | 1.250.681.695.136,38 | (8,36) | Negatif |
| 2019 | 1.399.139.190.532,32 | 7,07 | Positif |
| 2020 | 1.327.545.973.658,59 | (0,86) | Negatif |
| 2021 | 1.340.506.333.454,01 | 0,98 | Positif |

Lampiran 9: Pertumbuhan Belanja**Hasil Perhitungan Pertumbuhan Belanja
Tahun 2017-2021**

| Tahun | Realisasi | Pertumbuhan Belanja (%) | Kriteria |
|--------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 2016 | 1.329.720.164.897,00 | – | – |
| 2017 | 1.353.258.094.692,40 | 17,70 | Positif |
| 2018 | 931.754.345.242,00 | (31,14) | Negatif |
| 2019 | 1.052.106.351.389,69 | 12,91 | Positif |
| 2020 | 993.468.521.285,57 | (5, 58) | Negatif |
| 2021 | 1.338.446.864.092,44 | 34,72 | Positif |